

Monograph on
**Politics &
Government**

**MEMUTUS INTERAKSI PATRON - KLIEN
di LINGKUNGAN PERKEBUNAN**

MEMUTUS INTERAKSI PATRON - KLIEN di LINGKUNGAN PERKEBUNAN

MONOGRAPH on **Politics and Government**

Vol. 3, No.2. 2009 (85-150)

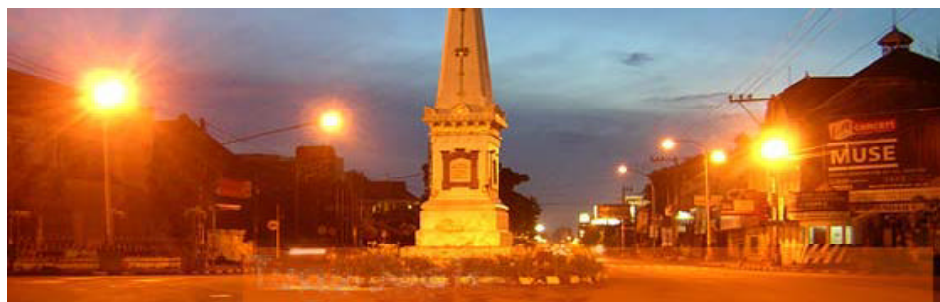
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	92
A. Latar Belakang	92
B. Rumusan Masalah	94
C. Tujuan Penelitian Tinjauan Pustaka	94
D. Landasan Teori	95
E. Metodologi Penelitian	96
F. Sistematisasi Tulisan	101
BAB II ASPEK SOSIOLOGIS PETANI TEMBAKAU VORSTENLANDEN	104
A. Sejarah Tembakau <i>Vorstenlanden</i> di Indonesia	104
B. Sejarah Singkat Perusahaan Pengelola Tembakau <i>Vorstenlanden</i>	106
C. Laggam Patron-Klien di Lingkungan Perkebunan	108
D. Menelusuri "Alam Rimba" Penelitian	113
BAB III DARI KOLEKTIF KE KTVL: WAJAH PENGUSAHAAN TEMBAKAU VORSTENLANDEN	117
A. Periode Sebelum Reformasi	118
B. Periode Setelah Reformasi	122
BAB IV REKAM JEJAK FPTV	125
A. Sejarah Awal Kelahiran FPTV	126
B. Strategi Perjuangan FPTV	127
C. Signifikansi Aktor Gerakan	131
D. Pola Pengorganisasian	134
BAB V MEMUTUS INTERAKSI PATRON KLIEN: SEBENTUK PENDEDAHAN	135
A. Menafsirkan FPTV sebagai Katup Gerakan Sosial	135
B. Menggugat Interaksi Patron Klien, Mereproduksi Hegemoni	141
BAB VI PENUTUP	146
A. Kesimpulan Teoritis	146
B. Rekomendasi Kebijakan	147
DAFTAR PUSTAKA	148

Diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM dan Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah dalam rangka ekspose tema-tema riset untuk didiskusikan lebih lanjut

KATA PENGANTAR

MEMUTUS INTERAKSI PATRON - KLIEN
di LINGKUNGAN PERKEBUNAN



MONOGRAPH *on* **Politics and Government**
Vol. 3, No.2. 2009 (85-150)

**MEMUTUS INTERAKSI PATRON - KLIEN
di LINGKUNGAN PERKEBUNAN**

MONOGRAPH *on* **Politics and Government**
Vol. 3, No.2. 2009 (89-150)

Kata Pengantar
**MEMUTUS INTERAKSI PATRON - KLIEN
di LINGKUNGAN PERKEBUNAN**

A. Latar Belakang

"Working Men of All Countries, Unit! (Segenap Kaum Buruh Sedunia bersatulah!)".

Karl Marx (1818-1883)

Meski banyak yang mencerca gagasan "persatuan kaum buruh sedunia" sebagai gagasan utopis, namun Marx tetap tepat ketika mengatakan persatuan kaum buruh merupakan solusi untuk menolak eksploitasi. Hal itu bisa dipahami karena Marx adalah tokoh utama peletak dasar teori-teori perubahan yang revolusioner. Dalam teoritisasinya yang lain, Marx mengatakan, "ilmuan bukan sekedar mereka yang mampu memahami realitas dunia, namun adalah mereka yang mampu mengubahnya". Itulah Marx, orang yang berabad-abad lamanya disebut-sebut sebagai pemberi harapan bagi kaum marginal.

Tidak untuk membela teoritisasi Marx, apalagi dalam beberapa konsep yang dinilai sangat kaku, kami hanya ingin mengatakan bahwa Marx telah meniupkan roh untuk sebuah perubahan (struktur). Kata kunci "persatuan kaum marginal" merupakan imaji yang cerdas bagaimana keluar dari struktur yang eksploitatif. Hanya itu saja. Mengapa? Karena penelitian kami menemukan bahwa persatuan (pengorganisasian) kaum marginal-lah embrio dari perubahan struktur yang sebelumnya eksploitatif.

Petani tembakau *vorstenlanden* di Klaten merupakan "kaum" yang telah ratusan tahun lamanya tereksploitasi oleh sang pemilik modal. Di zaman feodal kerajaan, *apanage*

atau *bekef* adalah sang eksploitor petani. Di zaman kolonial, perusahaan Belanda yang ganti mengeksploitasi petani di Klaten. Bahkan, pasca kemerdekaan, struktur eksploitatif itu masih dipelihara perusahaan negara (PTPN X). Kenyataan inilah yang disebut-sebut sebagai sebuah interaksi patron klien.

Namun, selesai sudah semua cerita eksploitatif itu. Sekarang, kaum marjinal Klaten telah membentuk sebuah persatuan berupa Forum Petani Tembakau *Vorstenlanden* (FPTV). Gerakan FPTV telah banyak membawa perubahan dalam sosial-politik-kultur masyarakat perkebunan tembakau di Klaten. Hubungan patron-klien yang eksplotatif, juga telah bergeser. Bahkan, FPTV telah mampu mengangkat *bargaining position* petani dihadapan PTPN X (perusahaan negara yang selama ini mengeksploitasi petani). Ini adalah sejumput bukti ketika persatuan kaum marjinal mampu mengubah struktur hegemoni kaum modal. Setidaknya Marx benar dalam mengatakan *Working Men, Unit!*.

Meski banyak menonjolkan dokumentasi cerita (konsekuensi metode *case study*), penelitian ini telah kami usahakan mengarah pada pembahasan terputusnya hubungan patron-klien. Beberapa pembahasan mencakup pada wilayah; bagaimana kondisi sosio-kultural (juga politik) di masyarakat perkebunan tembakau *vorstenlanden*. Juga latar belakang munculnya gerakan FPTV, termasuk model gerakannya. Pada titik tertentu, kami tidak hanya membahas patron-klien saja, namun juga gerakan sosial, hegemoni, dan intelektual organis. Semoga apa yang kami uraikan itu dapat terpenuhi dengan membaca laporan penelitian ini.

Kami menyadari bahwa penelitian ini tidak akan berjalan tanpa ada program Hibah Riset dan Publikasi Mahasiswa dari Fakultas ISIPOL UGM. Kami juga berterima kasih atas pinjaman dana lapangan dari Jurusan Ilmu Pemerintahan (JIP), yang meski jumlahnya sangat kecil, telah mengurangi beberapa beban kesulitan penelitian ini. Serta ucapan terima kasih pada semua informan yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk kami. Wening Swasono, ketua FPTV, yang secara serius membantu agar penelitian kami bisa terselesaikan. Juga Slamet, sekretaris FPTV, yang telah merelakan peminjaman dokumentasi FPTV. Tryas Prasetya, direktur Mitra Tani, Mira, peneliti PSAP, dan Bambang M, wartawan Aji, yang banyak berkisah tentang kejadian awal penginisiasian gerakan. Serta bantuan yang sangat berharga dari PTPN X melalui wawancaranya dengan Murtono, Subagyo, Santo Rahayu.

Kami juga menyadari bahwa kelebihan ide dalam penelitian ini bukan gagasan orisinil kami, namun juga hasil dialog dengan berbagai orang dalam berbagai komunitas. Sehingga perlu sekiranya untuk berterima kasih pada mereka. Komunitas dosen JIP, yang telah mentransfer gagasan dalam kuliah maupun diskusi kusir di berbagai tempat. Secara khusus, ucapan terima kasih untuk Wawan Mas'udi sebagai pembimbing penelitian ini. Tidak ketinggal pula kawan-kawan Korp Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Komap) yang rela menyita aktivitasnya demi nama korp. Juga pers mahasiswa Sintesa yang telah banyak memercikkan pencerahan dalam setiap jengkal aktivitasnya. Serta semua orang yang telah membantu namun tidak bisa disebutkan disini secara keseluruhan.

Karya ini tentunya memiliki banyak kelemahan karena keterbatasan pengetahuan dan rendahnya pembacaan realitas yang kami miliki. Sehingga kami pun membuka diri atas segala kritikan dan saran bagi penyempurnaan karya tulis ini. Semoga karya tulis ini dapat memberikan kontribusi yang berharga, baik dalam keilmuan kami sendiri, perkembangan kajian akademik, dan terutama bagi tegaknya keadilan untuk rakyat yang termarjinal di Indonesia.

Yogyakarta, 2 November 2008

Naskah Akademik

**MEMUTUS INTERAKSI PATRON - KLIEN
di LINGKUNGAN PERKEBUNAN**



MONOGRAPH *on* **Politics and Government**
Vol. 3, No.2. 2009 (85-150)

ISSN 1979-0244

**MEMUTUS INTERAKSI PATRON - KLIEN
di LINGKUNGAN PERKEBUNAN**

MONOGRAPH *on* **Politics and Government**

Vol. 3, No.2. 2009 (85-150)

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Sejarah sosial, politik, dan budaya di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, selalu diliputi praktik feodalisme yang mewaris sejak zaman kerajaan. Dalam struktur yang menciptakan stratifikasi sosial yang timpang tersebut, masyarakat awam pribumi merupakan golongan mayoritas yang subordinat karena berada dalam dominasi dan hegemoni golongan elite kerajaan. Salah satu dampaknya, dalam kehidupan sosial dan ekonomi, praktik feodalisme memunculkan kultur patronase yang kental. Dinamika itulah yang terkondisikan juga dalam sistem pengusahaan perkebunan di Indonesia sekarang, tidak terkecuali perkebunan tembakau *Vorstenlanden* yang dibudidayakan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Ditilik dari sudut pandang historis, patronase di perkebunan tembakau *Vorstenlanden* pada zaman kerajaan tidak dapat dipisahkan dari sejarah agraria di Klaten. Ketika tembakau untuk cerutu tersebut pertama kali ditanam pada 1858 oleh pengusaha Mendez da Costa, di Desa Jetis (Klaten) (Padmo, Soegijanto dan Djatmiko, Edhie 1991:34), wilayah Klaten tengah berada dalam kekuasaan Kasunanan Surakarta (Suhartono 199:27). Karena itu, tanah di Klaten secara otomatis dimiliki kerajaan, sementara masyarakat awam yang mengolah berstatus sebagai buruh penggarap. Lantaran kemudian tanah diserahkan ke elite di tingkat desa (kepala desa) untuk digarap, lahirlah interaksi Patronklien yang berlapis, baik antara petani dan kepala desa (*bekel, lurah*) maupun antara petani dan penguasa tanah (Soeprpto, Y. Sarworo Nasikun, dan Purwanto 2003:259-270). Peta ini termarginalkan dalam status klien.

Diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM dan Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah dalam rangka ekspose tema-tema riset untuk didiskusikan lebih lanjut

Ternyata, praktik patronase di atas masih bertahan kuat meski pada penghujung abad XVII, Belanda memperkenalkan sistem perusahaan perkebunan yang “modern” (Kartodirdjo, Sartono dan Suryo-Djoko 1991:9). Dalam konteks ini, “modern” berarti berskala besar dan kompleks, menggunakan areal luas, padat modal, memakai tenaga kerja yang besar (dengan pembagian kerja yang rinci dan struktur hubungan kerja yang rapi), memanfaatkan teknologi modern, serta berorientasikan pasar (Mubyarto et.al. 1992:15). Sistem yang perlahan menggerus *mode of production* perkebunan rakyat yang subsisten tersebut justru menampilkan patron baru. Bukan lagi kepala desa dan penguasa tanah, melainkan para pengusaha swasta perkebunan yang umumnya orang-orang Belanda.

Tidak jauh berbeda, pasca-Orde Baru ketika perkebunan tembakau *Vorstenlanden* dikelola PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara, lagi-lagi praktik patronase tidak serta merta luntur. Paling tidak, pada tahun 2003, Y. Sarwono Soeprapto Nasikun dan Purwanto menengarai, interaksi yang menempatkan kelompok buruh dan petani sebagai klien tetap eksis, meski wujudnya tersamar dan halus (Soeprapto, Y. Sarworo Nasikun, dan Purwanto 2003:259-270). Menurut mereka, bertahannya praktik patronase dalam rentang waktu yang lama bahkan sampai sekarang disebabkan oleh petani yang cenderung apatis dan menerima nasib, tidak sedikit pihak selain petani dan buruh yang turut diuntungkan dari sistem, dan roda perekonomian tembakau *Vorstenlanden* yang terintegrasi dengan kapitalisme global yang eksploitatif (Soeprapto, Y. Sarworo Nasikun, dan Purwanto 2003:269).

Kilasan fakta historis di muka, mulai dari zaman kerajaan, kolonialisasi Belanda, hingga pascaOrde Baru, membuktikan betapa petani selalu berada dalam belenggu ketidakberdayaan. Mereka termarginalkan dalam setiap struktur perkebunan masing-masing zaman, meski waktu sejatinya tidak pernah berhenti bergulir. Ketika interaksi Patronklien yang merupakan permasalahan utama petani tidak dapat diputus, meminjam istilah Karl Marx (Johnson Doyle Paul 1994:142), petani (dan buruh perkebunan) benar-benar teralienasi dari sesamanya dan kodrat sosialnya sendiri. Pertanyaannya kini, apakah situasi tersebut masih langgeng di Orde Reformasi yang berjalan sudah lebih dari satu dekade?

PascaOrde Baru, gelombang demokrasi yang membuka peluang akan “pekikan suara” dari kelompok akar rumput (*grassroot*) untuk mengubah struktur yang konvensional, otoriter, kaku, bahkan represif; agaknya meletup juga dari lingkungan “industrial” perkebunan tembakau *Vorstenlanden*. Upaya petani dalam meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) di hadapan PTPN X menarik untuk diteliti sebagai bagian dari arus gerakan sosial yang menjadi *mainstream* perihal partisipasi rakyat pascaOrde Baru. Untuk itu, signifikansi peran Forum Petani Tembakau *Vorstenlanden* (FPTV) merupakan bagian sentral dan vital dilihat dari rahim kelahirannya yang bertepatan pada tahun 1998¹, tahun yang jamak dipahami sebagai titik balik dari pemerintahan otoriter Orde Baru ke arah Orde Reformasi.

¹ Penulis perlu mengungkapkan sedari dini, sepak terjang FPTV sebagai forum pemersatuan gagasan petani *Vorstenlanden* di Klaten baru diketahui ketika satu dari kami (penulis) tengah merampungkan liputan untuk *Jurnal Balairung*. Dengan keterbatasan dana dan waktu, laporan reportase tersebut tentu belum detail dan tidak diformulasikan lewat analisis ilmiah mendalam.

Mencuatnya gerakan FPTV dapat dianalogikan sebagai “fenomena gunung es” terhadap aneka unsur represif birokratis Orde Baru. Tidak dapat dinafikkan, sebelum tahun 1998, petani tembakau *Vorstenlanden* memang dilumuri kebijakan eksploitatif yang tersamar dan halus. Selain “dikelabui” Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang *notabene* merupakan instrumen kontrol atau panjang tangan pemerintahan Orde Baru², juga dibonsai dengan adanya Surat Keputusan (SK) Bupati Klaten menyangkut harga pembelian tembakau *Vorstenlanden* yang semestinya merupakan hak penuh setiap individu petani³. Dengan kata lain, kedaulatan petani atas tanah sekaligus mata pencahariannya tereliminasi oleh struktur pemerintahan Orde Baru yang feodal dan berwajah patron.

Tidak ayal, pada tahun 1998, ketika situasi tersebut sirna bersamaan mengemukanya gerakan penyatuan, tuntutan, dan advokasi FPTV, ekspektasi akan menguatnya daya tawar petani kemudian menyembul. Setelah lebih dari satu dekade eksis, FPTV tentu merekam segenap persoalan yang menggembirakan dan timpang dalam hubungan kerja dengan PTPN X. Alhasil, gerakan FPTV layak ditelusuri lebih detail sebagai gerakan sosial di lingkungan perkebunan tembakau *Vorstenlanden* yang dalam catatan sejarah kental dengan praktik patronase. Pasca-Orde Baru, FPTV merupakan kekuatan dari akar rumput yang memutus interaksi patronklien tersebut.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini dirancang untuk membongkar masalah berkaitan dengan kegelisahan penulis. Yakni, (1) faktor-faktor apa yang melatarbelakangi gerakan FPTV sebagai manifestasi kedaulatan petani di perkebunan tembakau *Vorstenlanden*? Lontaran tanya tersebut menyambung dengan (2) bagaimana FPTV mengaktualisasikan gagasan dalam tataran praktis sebagai gerakan yang mengangkat *bargaining position* petani di hadapan PTPN X? Hal itu berkaitan dengan (3) bagaimana dampak (*impact*) gerakan FPTV dalam struktur hubungan Patronklien di lingkungan perkebunan tembakau *Vorstenlanden*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk (1) menunjukkan faktor-faktor yang melatarbelakangi gerakan FPTV sebagai manifestasi kedaulatan petani di perkebunan tembakau *Vorstenlanden*. Selain itu, juga (2) memahami aktualisasi gagasan FPTV dalam tataran praktis sebagai gerakan yang mengangkat *bargaining position* petani di hadapan PTPN X. Sebagai pamungkas, penulis akan (3) mediskripsikan perubahan yang terjadi dalam struktur hubungan Patronklien di lingkungan perkebunan tembakau *Vorstenlanden*?

² HKTI di sini difungsikan “seakan-akan” sebagai wakil petani untuk memperjuangkan kepentingan petani di hadapan PTPN X. Namun, HKTI tidak menghimpun partisipasi petani secara langsung karena memang dilahirkan dari rahim “negara” Orde Baru.

³ Usai HKTI berunding dengan PTPN X soal areal penanaman dan harga pembelian tembakau kering, turunkah SK Bupati yang sifatnya memaksa petani sehingga mesti tunduk, betapapun tidak berpihaknya hasil perundingan HKTI dengan PTPN X terhadap petani.

D. Tinjauan Pustaka

Menurut penelusuran penulis, setidaknya terdapat tiga karya ilmiah akademis yang menyinggung secara langsung perkebunan tembakau *Vorstenlanden*. *Pertama*, disertasi Soegijanto Padmo yang dibukukan dengan judul "*The Cultivation of Vorstenlands Tobacco in Surakarta Residency and Besuki Tobacco in Besuki Residency and Its Impact on the Peasant Economy and Society: 1860-1960*" (1994). Di satu sisi, studi ini merupakan pencatatan historis yang lengkap menyangkut kajian sosial, politik, dan ekonomi perkebunan tembakau *Vorstenlanden* dan *Besuki* selama kurun waktu tahun 1860-1960. Namun, di sisi lain, kekurangan studi ini yakni tidak cukup untuk dijadikan referensi dalam memahami situasi yang berkecamuk baik setelah tahun 1960, apalagi pascaOrde Baru. Padahal, banyak perubahan signifikan yang terjadi dan perlu dianalisis lebih lanjut untuk kepentingan kebijakan ke depan.

Kedua, meski tidak eksplisit menyebut kata "*Vorstenlanden*", buku "*Tembakau: Kajian Sosial Ekonomi*" (1991) oleh Soegijanto Padmo dan Edhie Djatmiko juga masuk dalam pertimbangan tinjauan pustaka. Buku ini merupakan referensi penting untuk mengetahui sejarah tanaman, pengusahaan dan pemasaran, serta kecenderungan pertembakauan di Indonesia dalam konteks sosial dan ekonomi. Nalar kritis yang diusung buku ini terasa kental ketika mendasarkan analisis pada Teori Ketergantungan oleh Andre Gunder Frank. Namun, buku ini tidak detail dalam mengkaji situasi sosial dan politik perkebunan tembakau *Vorstenlanden* secara khusus. Terlebih lagi, buku ini tergolong kajian sebelum tahun 1998 sehingga tidak mungkin mengkritisi gerakan petani dalam menyikapi represi negara yang struktural-birokratis. Buku ini masih sekadar mendeskripsikan, itu pun sekilas, ketidakberdayaan petani dan buruh perkebunan *Vorstenlanden* yang pasif.

Ketiga, artikel Y. Sarworo Soeprapto, Nasikun, dan Purwanto berjudul *Hubungan Patronklien di Lingkungan Perkebunan Tembakau Vorstenlanden Klaten Jawa Tengah: Perspektif Sosiologis tentang Ketahanan Nasional* yang dipublikasikan pada jurnal *Sosiohumanika*, Januari 2003. Inilah tulisan paling mutakhir jika ditilik dari segi waktu publikasi. Artikel ini pula yang mulai menyinggung kajian sosiologis dan berhasil memaparkan fakta masih bercokolnya interaksi Patronklien di lingkungan perkebunan tembakau *Vorstenlanden*. Namun, beberapa kelemahan yang luput dikaji dalam artikel ini dapat ditemui. Selain tidak memerhatikan dengan lebih serius keberadaan FPTV (karena hanya disebut dalam satu kalimat), juga masih mempertahankan pendekatan teoritis yang sama dengan buku "*Tembakau: Kajian Sosial Ekonomi*" (1991), yakni teori ketergantungan, selain juga menyinggung kajian patronklien dan parameter ketahanan nasional.

Mencermati tiga pustaka di atas, penelitian ini merupakan kajian baru yang akan menggunakan pendekatan gerakan sosial dalam menganalisis peran FPTV yang terbentuk bersamaan dengan keruntuhan Orde Baru. Kontribusi FPTV yang sudah berjalan 10 tahun tentu berpengaruh terhadap praktik patronase yang ditengarai oleh Soeprapto, Nasikun, dan Purwanto masih begitu kental. Kajian tentang FPTV, dengan kata lain, ingin membuktikan signifikansi gerakan FPTV sehingga melengkapi, bahkan mengoreksi, artikel akademis Soeprapto, Nasikun, dan Purwanto yang masih dalam aras permukaan, karena

disajikan “sekadar” untuk publikasi jurnal sehingga tidak menganalisis praktik patronase dengan lebih dalam dan gagal menemukan gerakan FPTV sebagai “titik kisar” yang paling berpengaruh di lingkungan perkebunan tembakau *Vorstenlanden* semenjak tahun 1998.

E. Landasan Teori

1. Interaksi Patronklien yang Laten

Sebagai penyakit ketergantungan pribadi yang berkembang dalam kultur feodalisme, interaksi patronklien banyak disorot ilmuan politik dan sosial dunia maupun dalam negeri. James C. Scott, guru besar ilmu politik dari Universitas Yale (Amerika Serikat), salah satunya. Ia berpandangan, interaksi Patronklien merupakan kasus khusus dari ikatan diadik (dua orang) yang bersifat dikhotomis dan hierarkis, antara “yang lebih tinggi” (patron) dan “yang lebih rendah” (klien) (Scott, James C. 1993:7-9). Menurutnya, interaksi patronklien,

... terutama melibatkan persahabatan instrumental di mana seorang individu dengan status sosial-ekonomi yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumberdayanya untuk menyediakan perlindungan dan/atau keuntungan-keuntungan bagi seseorang dengan status lebih rendah (klien) (Scott, James C. 1993:7).

Sementara itu, menurut perspektif antropologis, Koentjaraningrat mengistilahkan interaksi patronklien dengan hubungan induk semang-klien. Induk semang dapat dimaknai sebagai orang atau pihak yang berkuasa dan harus memberi perlindungan sebanyak mungkin ke kliennya. Sementara itu, klien wajib membalas budi baik induk semang dan membelanya terhadap para kompetitor (Koentjaraningrat 1990:160-161).

Dalam konteks ini, secara tegas terkondisikan adanya relasi timbal-balik yang menempatkan klien di bawah dominasi dan bayang-bayang “utang budi” induk semang. Dengan begitu, klien tidak dapat lepas dari ketergantungan “kekuasaan” induk semang.

Dua pengertian definitif itu menjurus pada karakteristik diadik Patronklien yang khas sebagaimana diutarakan Scott, yakni “didasarkan pada ketidaksamaan” dan “fleksibilitas yang tersebar” sebagai sistem pertukaran pribadi (Scott, James C. 1993:8). Diperkuat dengan argumentasi David Levinson dan Melvin Ember dalam *Encyclopedia of Cultural Anthtropolgy* (1996) yang dikutip Soeprapto dkk., dua karakteristik tersebut dibungkus halus sebagai fakta sosial-kultural yang hanya didasarkan pada perjanjian informal (Soeprapto, Y. Sarworo Nasikun, dan Purwanto 2003:259-270). Tetapi, dalam praktik, tidak pernah ada garansi akan munculnya distorsi-distorsi yang bersumber dari percampuran dengan kepentingan ekonomi dan politik. Melihat situasi tersebut, peluang terjadinya eksploitasi pun menjadi sangat besar (Soeprapto, Y. Sarworo Nasikun, dan Purwanto 2003:259-270).

Sebagai mekanisme sosial, interaksi Patronklien tidak bersifat modern ataupun tradisional secara utuh (Scott, James C. 1993:8). Karena itu, jika dikontekstualisasikan

dengan praktik patronase di perkebunan tembakau *Vorstenlanden* yang melintas zaman sehingga bertahan lama (mewaris) di atas, tentu saja terdapat adanya praktik menukangi dari sistem (patronklien) yang eksis sebelumnya. Logika tersebut dapat dibaca dari terinternalisasikannya praktik patronase dalam sistem perkebunan pada zaman kolonialisme Belanda, meski sistem yang modern dan kompleks yang disebarluaskan Belanda sejatinya mampu menggerus subsistensi perkebunan rakyat yang telah berkembang sejak pada zaman kerajaan.

Masih dalam kerangka teoritis James Scott, setidaknya ada tiga ciri dasar dari hubungan patronklien (Scott, James 1972:91-113). Pertama, terdapat ketidaksamaan (*inequality*) dalam pertukaran status dan kekuasaan. Kedua, adanya hubungan tatap muka (*face-to-face character*) yang bersifat pribadi. Ketiga, sifat yang luwes dan meluas (*diffuse flexibility*). Untuk melihat lebih detail tentang arus patron ke klien dalam penelitian James Scott di Asia Tenggara, perlu diperhatikan kategori pertukaran lama yang menjadi pola interaksi patronklien (Putra, Heddy Shri Ahimsa, 1988:3-5).

- a. Penghidupan subsistensi dasar. Jasa utama yang diberikan oleh patron dapat berupa pekerjaan tetap atau tanah untuk bercocok tanam. Selain itu, tercakup juga penyediaan benih, peralatan, jasa pemasaran, serta nasehat teknis.
- b. Jaminan krisis subsistensi. Patron diharapkan memberikan pinjaman saat bencana ekonomi, membantu yang sakit atau kecelakaan, bahkan membantu saat panen gagal. Dengan demikian, patron menjamin "dasar" subsistensi kliennya dengan menyerap kerugian-kerugian (dalam pertanian dan pendapatan) yang bisa merusak kehidupan klien.
- c. Perlindungan. Patron melindungi klien dari bahaya pribadi (bandit, musuh pribadi) maupun dari bahaya umum (tentara, pejabat luar, pengadilan, pemungutan pajak).
- d. Makelar dan pengaruh. Patron menggunakan kekuatan dari luar untuk menarik hadiah (dari luar) bagi kepentingan kliennya. Jika perlindungan merupakan peran defensif patron dalam menghadapi dunia luar, maka kemakelaran merupakan peran agresifnya.
- e. Jasa kolektif patron. Patron dapat mengelola dan mensubsidi sumbangan dan keringanan, menyumbangkan tanah untuk kegunaan kolektif, mendukung sarana umum setempat (seperti sekolah, jalan kecil, bangunan masyarakat), menjadi tuan rumah bagi pejabat yang berkunjung, dan mensponsori festival serta perayaan desa.

Pola-pola tradisional tersebut merupakan gaya laten di mana ikatan patronklien secara struktural memang menguntungkan, tetapi sejatinya replika secara gaya dari ikatan kepatuhan zaman dulu (Putra, Heddy Shri Ahimsa, 1988:62). James Scott menawarkan dua argumen guna merefleksikan "kegagalan-kegagalan" dari pengalaman petani yang dikerangkai ikatan Patronklien yang, sekali lagi, hanyalah "replika". Pertama, "kegagalan" itu menjelaskan pola nilai, kepercayaan, dan persatuan bagi politik petani. Kedua,

merespons balik “kegagalan” itu sebagai bagian integral dari proses di mana petani menjadi tidak lagi penerima perubahan sosial yang pasif, tetapi mulai menciptakan pengalaman konkretnya sendiri (Putra, Heddy Shri Ahimsa, 1988:62).

2. Reproduksi Hegemoni dan *Organic Intellectuals*

James Scott dalam *Perlawanan Kaum Tani* (1993), sebagaimana banyak disinggung di atas, dengan jelas mengonsepsikan konstelasi antarkelas yang penuh konflik dan hegemonik. Dalam kajian Marxis, dua terminologi tersebut (“konflik” dan “hegemoni”) tidak relevan jika dilepaskan dari tradisi pemikiran yang berurat-akar dari Karl Marx; seorang teoritis konflik yang bertubi-tubi diserang kritik (otokritik) dari pengikutnya, salah satunya Antonio Gramsci.

“Sejarah dari semua masyarakat yang ada hingga saat ini adalah sejarah perjuangan kelas” (Johnson, Doyle Paul 1994: 146). Kutipan dari *The Manifesto Communist Party* tersebutlah yang mendasari kuatnya tradisi Marxisme tradisional yang merupakan landasan pemikiran teori konflik. Secara teoritis, terdapat tiga asumsi dasar yang berkembang dalam teori konflik.

Pertama, rakyat dianggap memiliki sejumlah kepentingan dasar di mana mereka akan berusaha keras untuk memenuhinya. *Kedua*, kekuasaan adalah inti dari struktur sosial dan ini melahirkan perjuangan untuk mendapatkannya. *Ketiga*, nilai dan gagasan adalah senjata konflik yang digunakan berbagai kelompok untuk mencapai tujuan masing-masing, ketimbang sebagai alat mempertahankan identitas dan menyatukan tujuan masyarakat (Fakih, Mansour 2004: 43).

Dalam kaitan dengan konstelasi antarkelas, menurut Yulia Sugandi, Marx sebenarnya mengagungkan kreativitas dan kemanusiaan dalam hubungan kerja. Bagi Marx, kerja secara umum merupakan kreativitas, tetapi justru kapitalisme yang mencegah masyarakat untuk bebas mengekspresikan kreativitas dalam berkarya (Sugandi, Yulia2002:102). Senada dengan itu, ketika Marx mengutarakan konsep alienasi (Sugandi, Yulia2002:103), masih menurut Sugandi, sesungguhnya Marx secara implisit menunjukkan adanya kasus separasi manusia dari kemanusiaan (*separation of humans from their humanity*), keikutsertaan terhadap produksi dari kebudayaan otentiknya, fragmentasi ikatan sosial, dan masyarakat (Sugandi, Yulia2002:103).

Kendati demikian, kaum kiri baru (*new left*) maupun teoritis non-Marxist tetap menaruh argumentasi penolakan terhadap Marxisme tradisional. Kaum kiri baru kemudian mengajukan analisis alternatif yang menekankan perhatian kepada peran manusia sebagai agen, termasuk ideologi, kesadaran kritis, dan pendidikan, dalam mentransformasikan krisis ekonomi menjadi krisis umum (Fakih, Mansour 2004:44).

Secara lebih khusus, Gramsci lewat konsep hegemoni menawarkan formulasi dengan tetap menempatkan kelas buruh sebagai pusat gerakan revolusioner (masih sehaluan dengan Marxisme tradisional), tetapi sekaligus membuka masuknya kelompok dan aliansi kelompok, yang semua itu lebih ditekankan pada transformasi kesadaran

kritis sebagai bagian dari proses revolusioner. Itulah ekstraksi logis yang dapat ditemukan dari definisi hegemoni yang dikutip Mansour Fakih dari G.A. Williams. Menurut interpretasi Williams, hegemoni merupakan

... tatanan di mana cara hidup dan pemikiran kelompok tertentu menjadi dominan, di mana satu konsep realitas disebarkan ke seluruh masyarakat dalam seluruh kelembagaan dan kehidupan pribadinya, yang memengaruhi seluruh citarasa, moralitas, kebiasaan, prinsip agama dan politik, dan seluruh hubungan sosial, terutama dalam pengertian intelektual dan moral (Fakih, Mansour 2004: 43).

Berpijak dari konsep Gramsci, tampaknya hegemoni ditempatkan pada wilayah kesadaran moral. Berbeda dengan dominasi yang diletakkan oleh Marx pada wilayah kepemilikan modal ekonomi. Akibatnya, tidak mungkin mencapai sebuah revolusi proletariat jika kaum proletar tidak memiliki dan tidak pernah mendapat pendidikan atas kesadaran revolusi. Untuk itu harus ada pendidikan kesadaran di kalangan proletar. Dengan cara demikian, maka reproduksi hegemoni bisa terjadi. Di sinilah letak terpenting dalam konsep Gramsci yang lain, yakni intelektual organik (*organic intellectuals*). Kelompok intelektual organik inilah yang kemudian dibebani mereproduksi hegemoni.

Setiap kelompok sosial, yang muncul di kawasan orisinal sebuah fungsi esensial di dunia produksi ekonomi, menciptakan bersama dirinya sendiri, secara organik, satu atau lebih strata intelektual yang memberikan homogenitas dan kesadaran fungsinya sendiri tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang sosial politik (Sugiono, Muhadi 2006: 43).

3. Gerakan Sosial yang Mengakar

Gerakan sosial, menurut Sidney Tarrow, merupakan tantangan kolektif yang dilakukan sekelompok orang yang memiliki tujuan dan solidaritas yang sama, dalam konteks interaksi kelanjutan dengan kelompok elite, lawan, dan penguasa (Tarrow Sidney 1998:4-5). Dari definisi tersebut, setidaknya dapat ditemukan empat kata kunci yang merupakan karakteristik dari gerakan sosial, yakni tantangan kolektif, tujuan bersama, solidaritas sosial, dan interaksi berkelanjutan.

Dalam pandangan teoritis lain, Donatella della Porta dan Mario Diani, sebagaimana dikutip Dimpos Manalu, menawarkan empat karakteristik gerakan sosial. Yakni, jaringan interaksi informal, perasaan dan solidaritas bersama, konflik sebagai fokus aksi kolektif, dan mengedepankan bentuk-bentuk protes (Dimpos Manalu 2008:244).

Dengan kata lain, gerakan sosial merupakan jaringan-jaringan informal yang mendasarkan diri pada perasaan dan solidaritas bersama yang bertujuan untuk memobilisasi isu-isu konfliktual melalui berbagai bentuk protes yang dilakukan terus-menerus (Dimpos Manalu 2008:244).

Bagaimana gerakan sosial bisa hadir? Susan Ekstein menerangkan, setidaknya ada dua penyebab yakni (Siahaan, Hotman M. 1993:63):

1. Perlawanan terjadi dikarenakan adanya ketidakadilan dan penindasan yang mereka alami tidak dapat ditolelir lagi, sehingga mereka berani mengambil resiko dengan melakukan konfrontasi langsung dengan hegemoni negara.
2. Lonjakan biaya hidup akibat krisis ekonomi yang tidak dapat diatasi oleh kaum petani, sementara respons institusi lokal, nasional, serta kultural tetap saja kurang kondusif.

Dari sudut pandang lain, gerakan sosial memicu konsekuensi tersendiri guna mewujudkan perubahan sosial. Harper menunjukkan tiga konsekuensi tersebut. *Pertama*, terjadinya dramatisasi isu sosial dan terciptanya masalah-masalah sosial. *Kedua*, dilakukannya perubahan-perubahan tertentu dalam kebijakan sosial. *Ketiga*, ekspansi akses struktural pada sumber-sumber tertentu seperti pendidikan, ketenagakerjaan, dan pemeliharaan kesehatan (Wahyudi 1997:9). Ketiga konsekuensi ini ternyata terjadi dalam kasus gerakan FPTV, khususnya dalam kaitan dengan perubahan sosial yang terjadi pascaOrde Baru.

Dari sisi strategi gerakan, Antonio Gramsci menyarankan, perjuangan kelas agar dilakukan dengan dua strategi utama (Fakih, Mansour 2004: 65-66). *Pertama*, “perang manuver” yang merupakan perjuangan mencapai perubahan jangka pendek untuk mengubah kondisi dalam rangka memenuhi kebutuhan praktis. *Kedua*, “perang posisi” sebagai perjuangan kultural dan ideologis jangka panjang. Kedua strategi gerakan sosial tersebut menuntut peran pendidikan agar meyakinkan kelas buruh akan politik perjuangan nilainya,

...yang dalam kepentingannya bukan tunduk kepada disiplin tetap dari kultur, tetapi mengembangkan konsepsi dunia dan sistem hubungan manusia, ekonomi dan spiritual yang kompleks yang membentuk kehidupan sosial global (Fakih, Mansour 2004:66).

Perang posisi inilah yang digunakan untuk mengetahui seberapa mengakar suatu gerakan sosial. Sebab, tanpa memiliki akar gerakan yang kuat, tentunya sebuah gerakan akan stagnan bahkan cenderung untuk gagal.

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Selama melangsungkan penelitian ini, metode yang dipakai sebagai pisau analisis adalah studi kasus (*case study*) yang bersifat kualitatif. Studi kasus adalah pendekatan penelitian terhadap satu kasus yang dilakukan secara intensif dan mendalam (Narbuko, Cholid 2003:164). Selain itu, studi kasus digunakan untuk menjawab pertanyaan *why* (mengapa) dan *how* (bagaimana) dalam sebuah perangkat peristiwa yang diteliti (Yin, Robert K. 2006:1). Dalam penelitian ini, yakni mengapa FPTV sampai terbentuk dan bagaimana latar belakang pembentukannya.

Digunakannya metode studi kasus tidak hanya sebatas pisau analisis, tetapi juga karena metode studi kasus dapat menjelaskan latar belakang kemunculan FPTV sebagai fenomena baru dan menarik di lingkungan perkebunan tembakau *Vorstenlanden*. Keunikan fenomena tersebut dibidik dari enam hal yang akan tersirat dan tersurat dalam laporan penelitian ini, yang meliputi (1) hakikat kasus, (2) latar belakang historis, (3) *setting* fisik, (4) konteks kasus terutama ekonomi, politik, hukum, dan estetika, (5) persoalan lain di sekitar kasus yang dipelajari, (f) informan atau tentang keberadaan kasus tersebut (Salim, Agus 2001:122).

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari pengurus FPTV, manajemen PTPN X Unit Tembakau Klaten dan petani pemilik lahan perkebunan tembakau *Vorstenlanden*, baik melalui wawancara langsung maupun observasi. Sementara itu, data sekunder adalah data pendamping yang diperoleh melalui artikel-artikel, laporan-laporan, maupun kliping koran. Lebih lanjut terkait data sekunder dapat dikoreksi dalam *Daftar Pustaka*.

3. Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dari bulan Juli hingga September, dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data tertentu antara lain:

a. Wawancara

Metode wawancara yang dipakai adalah wawancara langsung ke domain objek studi kasus penelitian ini. Wawancara berlangsung dengan manajemen PTPN X Unit Tembakau Klaten (Subagio, Murtono, Santo Rahayu), pengurus FPTV (Wening Swasono, Slamet), media massa (Bambang M. dari Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta), lembaga swadaya masyarakat (Tryas Prasetya), dan peneliti lapangan Pusat Studi Asia Pasifik UGM (Mira).

b. Dokumentasi

Keadaan dan *setting* dari penelitian ini didokumentasikan agar didapatkan data sekunder sebagai penguat data primer. Lokasi yang dibidik adalah suasana di gudang tembakau dan objek-objek lain yang teramati di seputar lahan tembakau *Vorstenlanden*, seperti tanaman tembakau *Vorstenlanden*, buruh perkebunan, dan los pengeringan daun tembakau *Vorstenlanden*.

c. Observasi

Observasi diperlukan untuk mendapatkan data primer, selain juga menangkap realitas yang terjadi untuk menjawab rumusan masalah. Lokasi observasi meliputi lahan tembakau *Vorstenlanden* di Desa Towangsan, Kecamatan Gantiwarno; Desa Gayamprit, Kecamatan Klaten Kota; di pedesaan sepanjang Jalan Raya Solo-Yogyakarta yang tengah ditanami tembakau *Vorstenlanden*; Gudang Wedi-Birit, Gudang Sorogedug dan Gudang Gayamprit; kantor PTPN X di Jalan Pemuda, Klaten; serta kantor kesinderan di Desa Gadungan, Kecamatan Wedi.

d. Studi Pustaka

Hasil dari data primer juga diperkuat dengan data-data yang bersifat literatur, berasal dari artikel, kliping koran, dan laporan-laporan. Lebih lanjut, dapat dilihat dalam *Daftar Pustaka*.

4. Sistematika Laporan

Pada Bab I, *Pendahuluan*, penulis menuliskan penjabaran tentang latar belakang penelitian gerakan Forum Petani Tembakau *Vorstenlanden* (FPTV) ini. Selain itu ditunjukkan pula rumusan masalah, tujuan penelitian serta penelusuran terhadap literatur ilmiah akademis yang masih terkait fokus penelitian. Landasan teoritis yang menjadi pisau analisis dalam penelitian, meliputi kajian tentang interaksi patronklien, reproduksi hegemoni dan kelompok *organic intellectuals*, serta gerakan sosial, pun dituliskan di bagian ini. Tujuannya agar memberikan gambaran konseptual dalam menelusuri lebih detail terkait aspek sosiologis di lingkungan perkebunan tembakau *Vorstenlanden* yang termuat dalam bab selanjutnya.

Dengan melakukan pembacaan sejarah, pada Bab II, *Aspek Sosiologis Petani Tembakau Vorstenlanden*, penulis menyajikan sejarah tembakau *Vorstenlanden* di Indonesia. Dalam realitas sejarah tersebut, ditunjukkan adanya praktik hubungan Patronklien yang melingkupinya, baik pada masa prakolonialisasi Belanda, saat kolonialisasi Belanda, maupun setelah masa kolonialisasi. Pembacaan terhadap sejarah dapat memberikan bekal pengetahuan untuk menelaah kondisi sosial, budaya, dan ekonomi di perkebunan tembakau *Vorstenlanden* pada masa kini.

Di Bab III, *Dari Kolektif ke KTVL: Wajah Pengusahaan Tembakau Vorstenlanden*, dinarasikan sistem-sistem pengusahaan tembakau *Vorstenlanden* yang pernah diterapkan perusahaan pengelola, yakni PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X). Dimulai dari sistem sewa, sistem kolektif, TVI (Tembakau *Vorstenlanden* Intensifikasi), ITVL (Intensifikasi Tembakau *Vorstenlanden*), hingga KTVL (Kemitraan Tembakau *Vorstenlanden*). Tujuan penarasian tersebut untuk memberikan ilustrasi mengenai hubungan yang terjalin antara petani tembakau *Vorstenlanden* dengan PTPN X. Dalam penerapan sistem tersebutlah, interaksi dan dampak yang ditimbulkannya dapat dianalisis untuk kemudian dikonseptualkan dalam bab selanjutnya.

Memasuki pembahasan paling substansif tentang gerakan petani tembakau *Vorstenlanden*, Bab IV, *Rekam Jejak FPTV*, penulis coba menjamah lebih dekat terkait gerakan FPTV. Aspek-aspek yang dinarasikan meliputi sejarah awal pembentukan, strategi gerakan, signifikansi aktor yang memelopori gerakan, dan pola pengorganisasian yang dibangun sehingga melibatkan partisipasi petani secara massif. Selain karena merupakan fokus kajian, narasi gerakan FPTV digarap agar memahami respons petani terhadap sistem pengusahaan yang mengerangkai pekerjaan sehari-hari petani di perkebunan tembakau *Vorstenlanden*.

Pada Bab V, *Memutus Interaksi Patronklien: Sebentuk Pendedahan*, dalil-dalil teoritis mulai digunakan untuk mendedah fakta-fakta temuan selama penelitian berlangsung. Penulis memaparkan bagaimana FPTV dapat dimaknai sebagai katup gerakan sosial petani tembakau *Vorstenlanden*. Dengan bekal tersebut, terbongkarlah bahwa praktik hubungan Patronklien yang mewaris itu ternyata telah terputus dengan adanya gerakan FPTV.

Di penghujung laporan penelitian ini, tidak ketinggalan pula, penulis menegaskan kesimpulan temuan yang terangkum dalam Bab VI, *Penutup*. Di bagian inilah, penulis berupaya memberikan sumbangsih dalam tataran teoritis dan saran kebijakan yang berlandaskan pada telaah hasil penelitian.

BAB II

Aspek Sosiologis Petani Tembakau *Vorstenlanden*

Suhartono dalam artikelnya, "Perkebunan Tembakau di Klaten: Tinjauan Historis", mengkritisi pidato pengukuhan Prof. Gonggripj. Pidato Prof. Gonggripj menjelaskan tentang perusahaan-perusahaan perkebunan Belanda yang berhasil memperkenalkan masyarakat, khususnya di Jawa, pada lalu lintas ekonomi dunia. Modernisasi dan kesejahteraan penduduk hadir karena adanya mekanisme pembukaan lapangan pekerjaan di lingkungan perkebunan. Hal tersebut jelas bertolak belakang dengan logika kolonialisme, di mana negara penjajah justru mengeksploitasi secara masif, tanpa hubungan timbal balik yang berimbang antara perusahaan dan petani. Keadaan yang terjadi bukan kesejahteraan, melainkan pemaksaan dan ketertindasan. Kondisi itulah yang luput dari pemahaman Gonggripj. Buktinya, aspek sosiologis masyarakat di setiap wilayah perkebunan selalu menunjukkan struktur patronklien. Siapapun yang berada di pihak perusahaan, seperti *ziender*, *mandor*, dan pegawai perusahaan, mereka merupakan patron bagi petani atau buruh di wilayah perkebunan itu dilaksanakan.

Hal demikian juga terjadi di wilayah Klaten. Untuk itu, penting sekiranya pembahasan tentang bagaimana aspek sosiologis masyarakat Klaten sebagai wilayah yang digunakan untuk usaha perkebunan tembakau. Hal ini kemudian berlanjut pada pertanyaan terkait struktur patronklien di wilayah perkebunan tembakau *Vorstenlanden* berlangsung, serta aktor-aktor yang terlibat dalam hubungan diadik tersebut. Kondisi geografis, demografis, maupun potret pengusaha tembakau di Klaten adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan untuk memahami kondisi sosiologis petani tembakau *Vorstenlanden*.

A. Sejarah Tembakau *Vorstenlanden* di Indonesia

Tanaman tembakau yang dikenal sekarang, belum diketahui secara pasti siapa penemunya. Namun, dalam berbagai buku disebutkan bahwa kedatangan ekspedisi Christophorus Columbus ke Benua Amerika, merupakan awal mula ditemukan tanaman tembakau. Dalam ekspedisi itu, Columbus menyaksikan penduduk asli, yaitu suku Indian, membawa ramuan yang terdiri dari daun kering (Padmo, Soegijanto dan Djatmiko, Edhi 1991:15). Daun kering yang dibawa suku Indian itu kemudian diperkirakan sebagai daun

tanaman tembakau. Columbus dan beberapa anak buah kapalnya melihat suku Indian menggulung daun tersebut, dan membakar salah satu sisi gulungan, kemudian menghisap daun tersebut pada sisi gulungan yang lain. Peristiwa bersejarah itu terjadi pada 2 November 1492 (Subangun Emmanuel dan Tanuwidjojo Djatmiko 1993:1).

Aktivitas yang dilakukan suku Indian tersebut sudah menjadi kebiasaan, di mana aktifitas menghisap daun tanaman tembakau dilakukan demi mendapatkan rasa nikmat, dapat mabuk, dan mengusir kepenatan. Selain untuk mendapatkan kenikmatan dan mengusir kepenatan, tanaman tembakau ternyata digunakan sebagai bahan pengobatan dan salah satu kebutuhan upacara ritual suku Indian. Khasiat dan kegunaan tembakau kemudian menjadi terkenal sampai ke luar Amerika. Kira-kira pertengahan abad XVI, biji dan tanaman tembakau dibawa ke luar Amerika, yaitu ke Lisabon ((Padmo, Soegijanto dan Djatmiko, Edhi 1991:16).

Pada 1559, seorang Duta Besar Perancis di Lisabon yang bernama Jean Nicot, mendapatkan benih tanaman tembakau dari seorang pedagang Belanda. Nicot sangat mengagumi khasiat tanaman tembakau ini, yang kemudian mengirimkan kepada Ratu Chatarina de Medici sebagai obat sakit kepala. Akibat dari kekaguman Nicot pada tanaman tembakau, dia kemudian mempelajari secara serius tanaman tembakau, termasuk sistematika botani tanaman tembakau. Hasil dari keseriusan mempelajari tanaman tembakau ini menghasilkan karya yang diberi judul *Historia Plantarum*. Pada 1586, karya Jean Nicot itu dimuat dalam buku *Dela Champ*. Di dalamnya, tanaman tembakau kemudian diberi nama *Nicotiana* (Subangun Emmanuel dan Tanuwidjojo Djatmiko 1993:2). Pemberian nama *Nicotiana* merupakan sebuah penghargaan terhadap Jean Nicot, atas keseriusannya mempelajari dan mendeskripsikan tanaman tembakau, mulai dari asal mula sampai persebaran tanaman tembakau itu sendiri. Nama *Nicotiana* kemudian dikenal sebagai nama genus dari tanaman tembakau dalam sistematika botani.

Sementara itu, kedatangan tembakau ke Indonesia (sebelum menemukan tembakau jenis *Vorstenlanden*), orang Belanda terlebih dahulu mencoba mengusahakan penanaman tembakau hampir di seluruh Jawa. Orang pertama yang mengusahakan penanaman tembakau adalah Mendez Da Costa, yang melakukan penanaman tembakau di Desa Jetis, Klaten, pada 1858. Tembakau yang ditanam di Klaten ini, pertama kali dipasarkan ke Eropa pada 1863 (Arsip PTPN X 2005:2). Usaha perusahaan tembakau didorong karena komoditas tembakau di pasar dunia merupakan primadona di abad XIX.

Awalnya, perusahaan tanaman tembakau dilakukan sebagai *mapping* daerah-daerah di Indonesia yang cocok untuk dilakukan penanaman tembakau yang nantinya menghasilkan tembakau berkualitas tinggi. Daerah-daerah yang digunakan percobaan perusahaan tanaman tembakau antara lain Klaten, Surakarta dengan tembakau jenis *Cagayan* dan *Manila*, Rembang yang diuji coba dengan berbagai jenis tanaman tembakau, dan Batavia dengan tembakau jenis *Manila* (Padmo, Soegijanto dan Djatmiko, Edhi 1991:35).

Dari daerah-daerah tersebut, hanya Klatenlah yang menghasilkan tanaman tembakau dengan kualitas paling baik. Ini membuktikan bahwa kondisi tanah dan iklim di

Klaten cocok untuk mengusahakan tanaman tembakau cerutu (Padmo, Soegijanto dan Djatmiko, Edhi 1991:35). Kondisi tanah di Klaten secara tidak langsung dipengaruhi oleh tanah dan air dari Gunung Merapi. Dengan bahasa lain, Klaten memiliki monopoli atas tanah.

Berbagai jenis tanaman tembakau dari berbagai varietas atau hibrida selanjutnya mulai dicobakan untuk ditanam di Klaten, tetapi hasilnya belum ada yang memuaskan. Sebelum akhirnya ditemukan hibrida tanaman tembakau oleh Lembaga Penelitian Tembakau *Vorstenlanden* pada 1930. Hibrida ini merupakan persilangan hibrida *Kenari* dan *Manila* (Padmo, Soegijanto dan Djatmiko, Edhi 1991:35). Hibrida jenis ini memiliki keunggulan antara lain memiliki daya tahan terhadap penyakit tanaman tembakau dan kualitas daun yang dihasilkannya sangat baik.

Hibrida tanaman tembakau ini kemudian dinamakan hibrida/jenis tembakau *Vorstenlanden*. Penamaan *Vorstenlanden* bukan berasal dari nama penemunya. Dikenal dengan nama "*Vorstenlanden*" karena daerah penanamannya di daerah Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta (*Vorstenlanden*=tanah raja-raja) yang berpusat di Klaten (Arsip PTPN X 2005:1). Jika ditilik secara etimologisnya, kata "*Vorstenlanden*" diambil dari penggabungan dua kata dalam Bahasa Belanda, yaitu "*vorsten*" yang berarti raja dan "*landen*" yang berarti tanah (Arsip PTPN X 2005:1). Jika digabungkan, kedua kata Belanda tersebut dapat diartikan sebagai "tanah para raja yang terletak antara dua kerajaan besar di Jawa saat itu, yaitu Kerajaan (Kasunanan) Surakarta dan (Kasultanan) Ngayogyakarta".

Di Indonesia, selain tanaman tembakau *Vorstenlanden* yang digunakan sebagai penghasil tembakau cerutu, sebenarnya ada jenis tembakau lain penghasil tembakau cerutu. Tanaman tembakau tersebut adalah jenis tembakau *Deli*, yang dihasilkan di sebagian wilayah Sumatera dan jenis tembakau *Besuki*, yang dihasilkan di wilayah Jember, Jawa Timur (Arsip PTPN X 2005:1). Ketiga jenis tembakau cerutu ini, mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama penghasil tembakau cerutu, sedangkan perbedaannya terletak pada ciri khas aromanya, karakteristik daun, dan jenis.

B. Sejarah Singkat Perusahaan Pengelola Tembakau *Vorstenlanden* (Padmo, Soegijanto dan Djatmiko, Edhie 1991:34)

Pascarevolusi kemerdekaan Indonesia "konflik kepemilikan aset" antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah kerajaan Belanda selalu mengemuka, termasuk mengenai kepemilikan perusahaan perkebunan. Dalam konteks awal kemerdekaan, terminologi yang tepat bukanlah "konflik kepemilikan aset", tetapi "pengambilalihan" atau "nasionalisasi" oleh pemerintah Indonesia. Pengambilalihan tersebut mengakibatkan terjadinya banyak perubahan terutama mengenai hak kepemilikan dan struktur organisasi yang berpuncak pada tahun 1957.

Pada tahun yang bertepatan dengan konflik menyangkut Irian Barat tersebut, perusahaan perkebunan di Indonesia mengalami perubahan secara keseluruhan, baik terkait hak kepemilikan maupun struktur organisasi. Konsekuensi yang kemudian menimpa berangkat dari pengambilalihan hak tersebut adalah seretnya kuantitas produksi pada musim tanam tahun 1957/1958. Tercatat, produksi tembakau cerutu di Klaten pada musim tanam tahun 1958/1959 menurun sebesar 30 persen dari tingkat produksi musim tanam sebelumnya. Namun kesulitan tingkat produksi itu dapat segera teratasi pada tahun 1960-an.

Pada periode tahun 1960-an pula, struktur organisasi perusahaan perkebunan yang baru mulai terbentuk sejalan dengan pemberlakuan PP Nomor 19 Tahun 1960. Sebelumnya, sejak masa penjajahan sampai akhir tahun 1957, negara mempunyai perusahaan perkebunan yang disebut *Gouvernement Landbouw Bedryen* (GLB) atau Pusat Perkebunan Negara (PPN). Perusahaan tersebut memiliki struktur organisasi yang sederhana dan belum terbagi menurut regional-regional tertentu. Baru setelah dikeluarkannya PP Nomor 19 Tahun 1960, perusahaan perkebunan negara dibagi berdasarkan kelompok regional dan diberi nama Pusat Perkebunan Negara Baru (PPN Baru). Perusahaan memiliki kantor pusat di Jakarta dan kantor cabang di masing-masing ibukota provinsi. Keberadaan kantor cabang bertugas untuk membantu kantor pusat dalam memberikan supervisi dan koordinasi kegiatan di berbagai perusahaan perkebunan di wilayah kerjanya.

Berkaitan dengan perusahaan tembakau cerutu di bekas wilayah Kasunanan Surakarta, PP Nomor 30 Tahun 1963 menyebutkan bahwa Badan Pemimpin Umum Perusahaan Perkebunan Negara (BPU PPN) Tembakau IV diletakkan di Klaten/Solo. Kebun utamanya meliputi Wedi-Birit, Kebonarum, Gayamprit, dan Bangak.

Pada perkembangannya, terjadi peleburan PTP XIX, PTP XXI-XXII, dan PTP XVII. Peleburan tersebut mengawali penamaan baru perusahaan perkebunan tembakau cerutu dengan sebutan PT Perkebunan Nusantara X. Perubahan paling mutakhir itu mengacu pada dua ketentuan yuridis. *Pertama*, Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 1996 Tanggal 14 Februari 1996 Tentang pengalihan BUMN sebagaimana tertuang dalam Akte Notaris Harun Kamil Nomor 43 Tanggal 11 Maret 1996. *Kedua*, Akte Perubahan sesuai Akte Notaris Sri Rahayu Hadi Prasetyo Nomor 01 Tanggal 12 Juli 2002.

Sejauh ini, PTPN X dikenal sebagai BUMN di bidang agribisnis yang berbasis tebu dan tembakau yang berorientasi ekspor. BUMN ini mempunyai unit-unit usaha yang tersebar di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Detailnya, PTPN X mengelola 11 pabrik gula dan 2 unit usaha strategis yang memproduksi dan mengekspor tembakau cerutu serta 3 unit rumah sakit umum. Selain itu, PTPN X juga mengadakan kerja sama dengan Burger AG Burger Swiss untuk mengelola jasa *Cutting Bobbin* dan 2 anak perusahaan yang bergerak dalam bisnis karung plastik, serta perusahaan Frozen Vegetable Kedelai Edamame dan Okura dengan orientasi ekspor ke Jepang.

C. Langgam Patronklien di Lingkungan Perkebunan

Dalam kehidupan masyarakat, tidak bisa lepas dari struktur hierarkis yang bersifat formal maupun informal. Semua aspek sosial politik kehidupan masyarakat di Indonesia, sejak dulu sampai sekarang, tidak bisa dilepaskan dari struktur hierarkis tadi, yaitu antara “yang di atas” (*upper*) dan “yang di bawah” (*lower*), antara “yang memerintah dan melindungi” dengan “yang diperintah dan dilindungi”. Hubungan dalam struktur hierarkis tadi memiliki pengikat yang kuat, yaitu ikatan simbiotik antara keduanya. Ikatan tersebut dilakukan untuk memenuhi kepentingan masing-masing individu. Hubungan seperti ini dikenal dengan pola hubungan patronklien, bersifat diadik, dan cenderung harmonis, meskipun salah satu pihak mengalami kerugian.

Secara normatif, pola hubungan patronklien bersifat diadik, dan cenderung harmonis. Patron adalah individu atau institusi yang memberikan perlindungan dan rasa aman kepada klien dalam hubungan sosial masyarakat. Sementara itu, klien adalah individu atau dimungkinkan juga institusi yang diberikan perlindungan dan rasa aman dari patron. Klien harus memberikan *reward* berupa kesetiaan sikap dan melakukan upaya resistansi terhadap musuh-musuh dari patron yang dibelanya. Posisi klien di sini lemah secara struktural dan bergantung pada patron. Tanpa patron, klien tidak bisa berbuat apa-apa.

Pola hubungan patronklien tidak hanya terjadi pada masyarakat Indonesia masa kerajaan atau prakolonialisasi, tetapi juga berlangsung secara terus menerus (kontinu) yang kemudian direproduksi oleh struktur organisasi yang lebih formal pada masa sekarang. Hegemoni patron menjadi kunci penting dalam bertahannya pola hubungan patronklien. Klien, meskipun seringkali terpaksa dengan sadar menyerahkan hasil-hasil tanaman dan tanahnya kepada patron. Pola pikir menolak terhadap permintaan patron akan membuat situasi klien pada khususnya dan wilayah klien pada umumnya, menjadi cenderung tidak aman dan tidak menentu. Pola-pola semacam ini terjadi di lingkungan perkebunan tembakau dari waktu ke waktu. Penulis menemukan adanya fase-fase tersebut dan membaginya dalam tiga bagian.

1. Prakolonialisasi Belanda

Sebelum mengetahui pola hubungan patronklien pada fase prakolonialisasi Belanda, terlebih dahulu perlu dipetakan aktor dan relasinya dalam pembentukan pola hubungan patronklien. Di Kerajaan Mataram Kuno yang pernah mencapai kejayaan sebelum tahun 1830, tanah kepemilikan kerajaan terbentang luas. Tanah-tanah ini seringkali disebut dengan *vorstenlanden*. Seluruh tanah yang terhampar di *vorstenlanden* dimiliki raja, tanpa terkecuali. Raja mempunyai hak membagikan tanah tersebut kepada orang yang berjasa bagi kerajaan.

Tanah-tanah raja tersebut dibagikan kepada para kerabat kerajaan dan birokrat istana atas pertimbangan status sosial dan perannya dalam kerajaan. Tanah-tanah raja yang dibagikan kepada kerabat dan pejabat kerajaan kemudian disebut dengan tanah

lungguh. Di desa, tentunya kita mengenal tanah *bengkok* yang pemanfaatan tanah dimiliki kepala desa yang menjabat.

Terdapat persamaan antara tanah lungguh dan tanah *bengkok*. *Pertama*, sifatnya temporal, di mana sewaktu-waktu keistimewaan dalam pengelolaan tanah tersebut bisa dicabut oleh yang berkuasa. *Kedua*, tanah *bengkok* dan tanah lungguh tetap tidak bisa dimiliki individu yang diberikan hak dalam pengelolaannya. Kalau tanah *bengkok* menjadi inventaris dari desa sedangkan tanah lungguh tetap menjadi milik raja. Yang dapat diusahakan dalam tanah *bengkok* dan tanah lungguh adalah usaha-usaha pemanfaatan dari tanah secara maksimal untuk mencapai hasil yang baik, di mana hasil dari pemanfaatan tanah lungguh tadi sama dengan gaji yang diberikan pihak kerajaan terhadap para birokrat-birokrat kerajaan. Mereka adalah pemegang lungguh (*patuh*) yang menikmati hasil tanah lungguh selama menjadi birokrat kerajaan (R. Soepomo, 1999:16).

Para *patuh* yang merupakan birokrat kerajaan dan kerabat raja, tidak akan mengelola tanah lungguh secara langsung. Mereka mengangkat seseorang yang diberi kepercayaan penuh dalam hal pengelolaan tanah, dari proses produksi sampai mencapai hasil. Orang ini disebut dengan *bekel*. Fungsi *bekel* adalah mengorganisasikan lungguh agar menghasilkan sesuatu untuk *patuh* (R. Soepomo, 1999:17). Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, *bekel* dibantu para petani. Kedudukan petani adalah penggarap (dalam arti sesungguhnya) dan panen dibagi dua (*maro*) hasil: 2/5 bagian *patuh*, 2/5 bagian petani dan 1/5 bagian *bekel* (Suhartono 1999:17). Jadi, *bekel* adalah *mandor* pertanian/perkebunan para petani yang mengawasi tugas petani dan bertanggung jawab penuh pada *patuh*.

Setelah konsepsi tentang tanah lungguh, *bekel*, dan *patuh* telah dijabarkan, pola hubungan patronklien dalam masa prakolonial di lingkungan pertanian/perkebunan di Klaten, dapat dipetakan dari relasi antaraktor. Raja merupakan pemegang otoritas mutlak atau absolut yang memberikan sumber-sumber kekuasaannya berupa tanah lungguh untuk didistribusikan (meskipun sifatnya sementara dan sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh raja) kepada para *patuh*. Dengan demikian, kekuasaan raja tanpa sengaja telah diimatisasi dalam kekuasaan para *patuh*. Para *patuh* memaksa petani untuk setia dan loyal kepadanya sebagaimana loyalitas dan kesetiaan mereka terhadap raja.

Meskipun terdapat paksaan (secara halus), interaksi kedua aktor menghasilkan hubungan yang cenderung harmonis, diadik, bersifat simbiotik dalam rentang waktu yang lama. Pola hubungan diadik inilah yang disebut dengan pola hubungan patronklien dengan menempatkan petani sebagai klien. Dalam hubungan struktural tersebut, posisi klien sangat lemah dan tidak mempunyai posisi tawar. Kondisi ini diperparah dengan beban yang harus ditanggung petani berupa pajak tanah, upeti kepada raja, dan tenaga-tenaga mereka dalam pemenuhan kepentingan *patuh* dan kepentingan desa. Sifatnya pun wajib. Tentunya berat ketika membayangkan petani menyisihkan tenaganya dari menggarap tanah para *patuh*, melakukan apa yang diinginkan *patuh*, dan mengerjakan kerja wajib desa yang "hanya" dibebankan pada mereka. Pola hubungan ini cenderung bertahan lama, lebih-lebih pada sistem feodal.

Struktur sosial masyarakat di Klaten saat itu masih bercirikan feodalisme lama kerajaan, di mana terdapat tiga lapisan sosial yang terbentuk. *Pertama*, bangsawan kerajaan. *Kedua*, para priyayi. *Ketiga*, petani. Di Klaten, didasarkan pada kepemilikan dan penggarapan tanah, lapisan sosial yang ketiga (petani) masih terbagi lagi dalam empat lapisan. Lapisan petani pertama adalah para *kuli kenceng*. Petani yang termasuk lapisan *kuli kenceng* ini mempunyai tanah, pekarangan, dan rumah milik sendiri. *Kedua*, *kuli setengah kenceng*. Petani lapisan ini cenderung tidak mempunyai tanah, tetapi pekarangan dan rumah. *Ketiga*, *kuli indung* atau *megersari*. Petani yang termasuk lapisan ini umumnya mempunyai rumah tetapi tidak di tanah sendiri, melainkan di tanah milik orang lain. Terakhir, *kuli dundhul* atau *kuli tlosor*. Petani dalam lapisan ini umumnya tidak mempunyai apa-apa, dan bekerja serabutan atau kasaran. Semakin ke atas dari lapisan petani yang terbentuk ini, semakin besar pula *tanggungan* (upeti dan hasil tanaman) yang harus diserahkan ke patron (Suhardi 1998).

2. Masa Kolonialisasi Belanda

Pola hubungan patronklien yang terjadi pada zaman prakolonialisasi, tidak berhenti meskipun Belanda masuk ke wilayah Indonesia dan melakukan penjajahan. Memang zaman keemasan kerajaan mulai dikikis oleh kolonial Belanda dan pola hubungan patronklien di lingkungan perkebunan pun tidak lantas hilang, tetapi mengalami pergeseran aktor beserta relasi aktor yang menjalankan pola hubungan diadik ini. Gambaran akan pergeseran pola hubungan patronklien ini dapat dilihat dalam alur sejarah ini.

Dalam lingkungan perkebunan tembakau yang terdapat dalam pembahasan ini, terjadi perluasan areal lahan perkebunan tembakau di awal masa kolonialisasi Belanda. Pemerintah Belanda saat itu diwakilkan oleh VOC (kongsi dagang pedagang Belanda). Sebagai koloni, negara penjajah mengeksploitasi semua sumber daya baik alam maupun manusia untuk dibawa ke negaranya. Logika profit menjadi sesuatu yang utama dan harus didapatkan. Ini yang menjadi landasan bagi pemerintah kolonial Belanda dan VOC untuk membuka areal lahan tembakau dan perkebunan lain seluas-luasnya. Ini dilakukan untuk memenuhi permintaan pasar dunia saat itu akan berbagai komoditas tertentu. Pada saat jaringan VOC mulai bercokol di Indonesia, areal tanaman tembakau berskala luas didapatkan di daerah-daerah seperti Kedu, Bagelen, Malang dan Priangan (Subangun Emmanuel dan Tanuwidjojo Djatmiko 1993:5). Dalam beberapa tahun bahkan perkebunan tembakau sudah dibuka di lahan-lahan perkebunan di luar Pulau Jawa.

Eksplorasi perkebunan dan komoditas yang dilakukan VOC tidak berlangsung lama dikarenakan bangkrut dan korupnya pegawai VOC. Pemerintah kolonial Belanda kemudian mengambil alih dan membuat kebijakan "besi" yang dikenal dengan sistem tanam paksa pada tahun 1830. Ini dilakukan demi kepentingan ekonomi pemerintah Belanda ditambah pula kas negara yang kosong.

Dalam pelaksanaan sistem tanam paksa, sumber daya alam dan manusia Indonesia kembali dieksploitasi secara besar-besaran. Hal itu untuk mengejar keuntungan dari komoditi yang menjadi primadona permintaan pasar dunia yang bisa diperoleh di Indonesia. Maka, tanam paksa pun tidak berlangsung lama dan berakhir pada tahun

1870. Hal ini disebabkan adanya industrialisasi perkebunan pada tahun tersebut yang perkembangannya cenderung cepat. Akibatnya, muncul perubahan kebijakan politik di tanah jajahan, dari kebijakan konservatif ke liberal.

Pergeseran kebijakan politik tersebut diikuti dengan perubahan kebijaksanaan *drainage*, yaitu politik eksploitasi tanah jajahan, yang semula dikelola perusahaan negara kemudian diganti dengan perusahaan swasta (Kartodirdjo, Sartono dan Suryo, Djoko 1991:12). Pada 1870, bisa dikatakan sebagai periode liberalisasi yang dilakukan kolonial Belanda di tanah koloninya. Perkebunan besar pun berkembang pesat setelah penghapusan Tanam Paksa dan pemberlakuan Undang-Undang Agraria Tahun 1870 (Subangun Emmanuel dan Tanuwidjojo Djatmiko 1993:13).

Berkembangnya liberalisasi perkebunan membuat pihak swasta dapat memiliki tanah pada areal tertentu dengan sistem kontrak atau sewa. Ini dimanfaatkan dengan baik oleh para pemodal swasta Belanda untuk menjadi pemilik perkebunan-perkebunan yang sebelumnya dipetakan pemerintah Belanda. Alhasil, banyak berdirilah perusahaan-perusahaan perkebunan milik asing.

Pergeseran kebijakan politik tersebut menggeser pula pola hubungan diadik Patronklien di lingkungan perkebunan. Pola yang tadinya berlangsung antara pemerintah Belanda dan pemilik lahan pada posisi patron dengan petani dan rakyat pada posisi klien mengalami perubahan. Patron baru muncul, yakni perusahaan perkebunan yang dimiliki pengusaha swasta Belanda. Perusahaan ini menjadi patron yang kuat, apalagi liberalisasi tanah mendatangkan problematika bagi para pemilik tanah yang lama. Sebab, tanah mereka justru disewakan pada pihak asing, dan diperkuat dengan undang-undang.

“Perusahaan perkebunan besar merupakan tulang punggung perekonomian Hindia Belanda selama periode 1930-1940, suatu masa di mana perubahan yang penting terjadi di industri perkebunan antara lain dalam pola tanam organisasi produksi dan lokasi perkebunan. Bahkan, konsep *plantation* (yang digunakan secara bergantian dengan *estate*) berubah secara drastis antara pertengahan abad XIX dan XX, baik dalam luas tanah yang diusahakan maupun struktur organisasi” (Padmo, Soegijanto dan Djatmiko, Edhie 1991:3).

Kutipan di atas menjelaskan apa yang terjadi di Klaten pada pertengahan abad XIX sampai pertengahan abad XX. Ada perubahan yang signifikan dalam metode tanam, produksi perkebunan, lokasi dan struktur organisasi di lingkungan perkebunan. Yang ingin disampaikan penulis adalah pada fase-fase tersebut di atas terbukti membawa perubahan besar dalam sistem perkebunan di Indonesia. Berkaitan dengan kondisi sosial politik, patron di lingkungan perkebunan terdapat pada tangan perusahaan perkebunan yang dimiliki asing, tidak lagi pada *bekele* maupun *patuh*.

Dengan demikian, pola patronklien tidak lagi bersifat feodalistis sebagaimana dijelaskan di muka, tetapi tampak lebih formal dengan struktur yang jelas. Dalam beberapa kasus, pola hubungan Patronklien justru dapat ditemukan pada hubungan struktural di lingkup perusahaan perkebunan zaman kolonialisasi Belanda. Bukan antara perusahaan

perkebunan dengan petani maupun buruh, tetapi struktur atasan bawahan yang terdapat dalam operasional perusahaan perkebunan. Seperti kutipan di bawah ini.

“Ciri lain yang lazim dijumpai dalam struktur organisasi perusahaan perkebunan khususnya perusahaan tembakau, adalah bahwa posisi penting pada umumnya diduduki oleh orang Eropa atau orang Belanda, sedangkan orang Jawa pada umumnya mempunyai kedudukan sebagai mandor, pegawai rendahan atau buruh harian lainnya” (Padmo, Soegijanto dan Djatmiko, Edhie 1991:51).

Di zaman kolonialisasi Belanda, jelas bahwa pola hubungan patronklien di lingkungan perkebunan tidak hanya bersifat struktural antara petani dan buruh dengan perusahaan perkebunan. Dalam struktur operasional perusahaan perkebunan pun, hubungan tersebut terjadi. Posisi masyarakat pribumi adalah klien yang harus setia dan loyal pada orang Eropa sebagai patron mereka. Posisi tawarnya rendah dan hanya bergantung dari kemurahan patron terhadap dirinya sebagai klien.

3. Masa Pascakolonial

Pola patronklien dalam fase ini sebenarnya hampir sama dengan masa kolonialisasi Belanda, tetapi dengan bentuk atau wajah baru. Pada masa pascakolonial, pola patronkliendimulai ketika terjadi nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda oleh pemerintah Indonesia yang saat itu dipimpin Presiden Soekarno. Setelah terjadi nasionalisasi perusahaan Belanda pada tahun 1957-1958 oleh pemerintah Indonesia, korporasi perkebunan berubah menjadi perusahaan perkebunan milik negara atau biasa dikenal dengan PNP (Perusahaan Negara Perkebunan) (Subangun Emmanuel dan Tanuwidjojo Djatmiko 1993:14).

Meskipun sudah dinasionalisasi, struktur organisasi perusahaan tidak lantas mengalami perubahan. Dengan kata lain, struktur pada masa pranasionalisasi masih tetap dipakai dalam operasional perkebunan. Struktur-struktur tersebut terus dipertahankan dan direproduksi secara hegemonik melalui sistem perusahaan perkebunan. Ini dapat dilihat dalam struktur operasional di PT Perkebunan Nusantara (PTPN), dengan masih mempertahankan istilah-istilah dan struktur kerja dalam Bahasa Belanda, semisal *ziender* dan *administrature*. Ini menunjukkan, sistem lama masih bekerja, meskipun dengan wajah baru. Pun dengan Patronklien yang tercipta masih berlangsung. Sedikit yang membedakan adalah Patronklien dalam struktur operasional, tidak lagi dipegang orang Eropa, melainkan orang Indonesia.

Namun, struktur Patronklien tidak banyak berubah, patron yang tercipta di Klaten masih juga bersifat jamak. Patron bukan hanya kepala desa dan priyayi/bangsawan pemilik tanah, tetapi juga pada pegawai perusahaan perkebunan. Seperti *zinder*, *administrature*, dan *mandor* yang masih diadopsi dari sistem kolonial. Apa yang menjadi keputusan pihak perusahaan, petani hanya mampu menerimanya saja tanpa berani menolak. Seperti, adanya penetapan tanam tembakau beserta harga melalui penetapan SK Bupati, hingga minimnya upah buruh tani. Inilah yang terus berlangsung di perkebunan tembakau *Vorstenlanden* di Klaten sampai menjelang 1998.

D. Menelusuri Alam Rimba Penelitian

1. Selayang Pandang Klaten

Secara geografis, Kabupaten Klaten terletak antara 110,30°-110,45° Bujur Timur dan 7,30°-7,45° Lintang Selatan. Wilayahnya terbentang antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kotamadya Surakarta. Di sebelah utara, Klaten berbatasan dengan Kabupaten Boyolali. Di sebelah timur berbatasan Kabupaten Sukoharjo. Di sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Sleman. Posisi strategis tersebut membuat Klaten banyak dikenal masyarakat karena berada di antara Yogyakarta dan Solo, dua kota yang sering dikunjungi wisatawan karena menyimpan warisan budaya yang melimpah.

Selama ini, Klaten juga dikenal sebagai wilayah pertanian yang produktif. Salah satunya, Klaten dikenal sebagai produsen beras organik Delanggu yang digemari masyarakat. Selain pertanian, Klaten juga dikenal sebagai daerah perkebunan tembakau dan tebu. Hal itu dapat ditilik dari keberadaan PT Perkebunan Nusantara X sebagai pengelola tembakau *Vorstenlanden* dan PT Gondang Baru yang memproduksi tanaman tebu menjadi komoditas gula. Bentangan sawah di Klaten akhirnya banyak dimanfaatkan untuk membudidayakan komoditas pertanian dan perkebunan, baik pada musim kemarau maupun penghujan.

Realitas agrikultural tersebut tidak terlepas dari tradisi masyarakat setempat yang tradisional-agraris. Sampai saat ini, penduduk Klaten, yang pada 2006 berjumlah 1.293.242 jiwa (BPS Klaten 2007:55), mayoritas masih bermata pencaharian di sektor pertanian. Fakta sosiologis tersebut sebenarnya ditopang keadaan alam Klaten yang sebagian besar merupakan dataran rendah dengan banyak sumber mata air, semisal Pluneng dan Geneng (BPS Klaten 2006:iii).⁴ Kaki Gunung Merapi yang berada di tenggara kabupaten ini pun berpengaruh terhadap kesuburan terhadap tanah di Klaten. Karena itu, secara geografis, Klaten memang memiliki "monopoli" (keunggulan) akan tanah yang subur.

Kesuburan tanah di Klaten merupakan dampak alamiah dari semburan lahar Gunung Merapi pada berabad-abad yang lalu. Berkat semburan lahar Gunung Merapi, banyaknya mata air dan sungai-sungai di daerah Klaten, tidak mengherankan jika tembakau *Vorstenlanden* dapat tumbuh dengan baik. Adanya semburan lahar Gunung Merapi merupakan faktor alamiah khusus mengapa tembakau *Vorstenlanden* tidak dapat ditanam di belahan bumi manapun, kecuali di wilayah Klaten. Jika memang dapat tumbuh, kualitas daun tembakaunya tidak akan sebaik dengan kualitas dari tembakau *Vorstenlanden* yang tumbuh di wilayah Klaten.

⁴ Dataran wilayah Klaten terbagi dalam tiga jenis. *Pertama*, dataran lereng Gunung Merapi di utara, meliputi sebagian kecil Kecamatan Kemalang, Karangnongko, Jatinom, dan Tulung. *Kedua*, dataran rendah di tengah, mencakup keseluruhan kecamatan, kecuali sebagian kecil wilayah yang merupakan dataran lereng Gunung Merapi dan Gunung Kapur. *Ketiga*, dataran Gunung Kapur di selatan, meliputi sebagian kecil Kecamatan Bayat dan Cawas.

2. Potret Perkebunan Tembakau *Vorstenlanden* di Klaten

Perkebunan tembakau *Vorstenlanden* di Klaten yang dikelola PTPN X memiliki empat gudang. Gudang pertama, di Gayampurit, khusus tembakau FIK. Gudang kedua adalah Gudang Kebunarum khusus tembakau *Na Oogst*. Sementara gudang ketigaterletak di Wedi-Birit sebagai gudang tembakau VBN. Gudang keempat di Sorogedug (Kecamatan Prambanan, Sleman) untuk tembakau *filler*. Tembakau *filler* adalah tembakau *low grade* baik dari VBN, FIK, dan *Na Oogst*.

Adapun kecamatan yang arealnya dijadikan lahan penanaman tembakau *Vorstenlanden* dapat dilihat di tabel di bawah ini:

Tabel 1
Persebaran Kawasan Penanaman Tembakau *Vorstenlanden*

No.	Kecamatan	Desa
1.	Gantiwarno	Towangsan, Jabung, Mlese, Ceporan
2.	Wedi	Kali Tengah, Canan, Gadungan, Birit, Sukorejo, Pandes
3.	Jogonalan	Bakung, Ngering
4.	Kebon Arum	Sumyang, Gondang, Ngrundul, Basin, Pluneng, Malangjiwan, Menden, Karangduren
5.	Klaten Selatan	Trunuh, Sumberejo, Danguran, Nglinggi, Karanglo
6.	Karang Nongko	Banyuageng, Jagalan, Demakijo, Jetis
7.	Ngawen	Manjung

Sumber:(Suhardi 1998:14).

Data di atas dirilis pada tahun 1999. Sedangkan untuk saat ini, PTPN X melakukan pengurangan terhadap areal perkebunan tembakau. Beberapa desa seperti Mlese, Birit, Sukerejo, Nglinggi, Banyuaeng, Jaganalalan, dan Manjung, pada tahun 2008 ini tidak lagi digunakan sebagai areal penanaman tembakau (Data Los Pengeriing Kebun Kebonarum 2008). Selain 7 kecamatan di Kabupaten Klaten, penanaman tembakau *Vorstenlanden* juga dilakukan di wilayah luar Klaten. Yakni, di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi Kecamatan Prambanan (1 desa) dan Kecamatan Berbah (1 desa) (Arsip PTPN X 2005:2).

Untuk memahami bagaimana potret perusahaan tembakau di lingkungan perkebunan, perlu dijelaskan bagaimana proses perusahaan tembakau *vorstenlanden*. Dalam proses perusahaan tanaman tembakau *Vorstenlanden* di Klaten, setidaknya melalui delapan tahap, meliputi :

1. Pembibitan. Yakni melalui beberapa teknis pekerjaan, di antaranya:

- a. Pembuatan pilen. Pilen dibuat dari benih *wose*⁵ yang sudah teruji, baik daya, kecepatan dan kesehatan kecambah. Pilen berasal *wose* yang sudah disimpan minimal satu tahun.
- b. Penyiapan media lahan. Lahan yang dipakai adalah medium tanah yang sesuai dengan kesepakatan.
- c. Bedengan. Bedengan adalah tempat persemaian bibit. Atap bedengan tersusun dari waring, plastik dan waring.

2. Pemeliharaan Pembibitan

- a. Sebelum diletakkan *pillen* dijemur.
- b. Siraman diletakkan pada *polybag* (tempat pembibitan), yang dilakukan secara bertahap.
- c. Tahapan setelah siraman berturut-turut adalah seleksi bibit, sulam bibit, pemupukan dengan dosis tertentu, pembukaan dan penutupan, serta pemantauan bibit yang dilakukan setiap hari setelah bibit berumur 21 hari.

3. Pengolahan tanah.

Pengolahan tanah dilakukan 40 hari sebelum dilakukan proses penanaman. Media tanam harus gembur. Skema jarak tanam dan pemasangan tiang naungan, pemberian pupuk kandang, drainase, bajak dan *silak gebrus* dilakukan sesuai petunjuk teknis penanaman.

4. Tanam dan pemeliharaan tanaman.

Mengenai seri tanam, jumlah ukuran tanaman per Ha², jadwal pekerjaan pemeliharaan tanaman, sulam tanaman, penyediaan *polybag*, serta menali tanaman, dilakukan sesuai petunjuk teknis penanaman tembakau

5. Petik

- a. Pelaksanaan petik dilakukan pagi hari mulai jam 05.00 dan selesai kurang lebih jam 07.30.
- b. Tanaman yang dipetik adalah tanaman yang produktif yang tentunya sehat dan tumbuh normal.

⁵ Bibit tembakau *Vorstenlanden*

6. Angkut tembakau basah.

Dalam pelaksanaan angkutan tembakau basah, prinsip yang dipakai adalah tidak menambah jumlah kerusakan.

7. Persiapan los pengering.

Tempat yang dijadikan los pengering harus rapat, kuat dan redup. Tanah dasar los harus selalu disiram tetapi tidak berdebu, juga jangan sampai becek. Kondisi los harus siap 7 hari sebelum proses pemetikan.

8. Pengerinan.

Tembakau, masuk los agar tetap segar dan tertata rapi.

Mengenai pemasaran, berdasarkan wilayah geografis, tembakau cerutu di Indonesia diekspor negara-negara Eropa seperti Belanda, Jerman, Swiss, Denmark, Perancis, dan Spanyol; Amerika dan Asia yakni Jepang dan Cina. Sementara itu berdasarkan pelaku bisnisnya, tembakau cerutu Indonesia dijual langsung ke pabrik industri cerutu sekaligus langsung ke pedagang di pasar lelang Eropa di Dith, Bremen, Jerman (Subagio 2008, wawancara). Lebih detail tentang pasar tembakau cerutu Indonesia, lihat Tabel 2 berikut.

Tabel 2
Pasar Tembakau Cerutu Indonesia

Pedagang	Asal Negara	Pabrikan	Asal Negara
Hellming Koehne Co	Jerman	Buger Sohn Burg	Swiss
Anton Ankersmit	Jerman	Henry Wintermans	Belanda & Denmark
Protabex	Swiss	Swedish Match	Swedia
Star Tobacco Supplier GmBH	Belanda	Tabacofina	Belgia
Gebruder Kulenkampff	Jerman	Neos Cigar	Belgia
Lancaster Leaf	Amerika	Villiger	Swiss
Vetab	Amerika	Altadish/Tabacalera	Spanyol
Intertrade	Amerika	Altadish/Seita	Perancis
		De Olifant	Belanda
		Galagher	Inggris
		Agio	Belanda

Sumber: (Subagio 2008, wawancara)

BAB III

Dari Kolektif ke KTVL: Wajah Pengusahaan Tembakau *Vorstenlanden*

Sejak diawali dengan penanaman tembakau di awal abad XVII, pengelolaan perkebunan tembakau di Indonesia dikendalikan pemerintah kolonial Belanda. Dengan masuknya pemerintah kolonial Belanda ke daratan Nusantara, dimulailah babak baru dari kehidupan kebun, ladang dan *tegalan* ke dalam sistem perkebunan kolonial. Babak baru itu merupakan peralihan secara sosial, ekonomi, dan kultural ke perkebunan yang disebut Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo sebagai sistem perkebunan modern. Sistem tersebut bercirikan: bentuk usaha pertanian yang berskala besar dan kompleks, menggunakan areal yang luas, bersifat padat modal, menggunakan tenaga kerja yang cukup besar dengan pembagian kerja yang rinci dan struktur kerja yang rapi, menggunakan teknologi modern, serta berorientasi pasar (Mubyarto et.al. 1992:15).

Sistem perkebunan kolonial itu merupakan salah satu mata rantai kapitalisme pertama yang hadir dalam masyarakat Indonesia untuk sekaligus terintegrasi dalam kancah perdagangan internasional (Subangun Emmanuel dan Tanuwidjojo Djatmiko 1993:13). Lewat sistem ini pula, para pengusaha swasta perkebunan mulai menyewa tanah penduduk pribumi untuk dibuka sebagai lahan perkebunan yang komoditasnya diekspor ke luar negeri terutama Eropa. Penduduk pribumi juga mulai menerima upah kerja sebagai buruh tani sehingga menggeser *mode of production* pertanian yang subsisten.

Setelah revolusi kemerdekaan, pengelolaan perkebunan diambil alih pemerintah Indonesia dan kini dipegang beberapa perusahaan negara bernama Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN yang berstatus BUMN. Dua PTPN yang mengelola perkebunan tembakau cerutu di Indonesia adalah PTPN II di Deli sebagai pengelola tembakau *Deli* atau tembakau *Sumatera* dan PTPN X sebagai pengelola tembakau *Vorstenlanden* di Klaten, Jawa Tengah dan tembakau *Besuki* di Jember, Jawa Timur.

Masing-masing perusahaan memiliki sistem pengusahaan komoditas yang berbeda. Sistem pengusahaan yang dipakai merupakan konsekuensi yang berkembang setelah pengelolaan perkebunan dikuasai korporasi. Dengan kata lain, tidak lagi digarap

secara subsisten oleh petani. Sistem tersebut merupakan bangunan ketentuan yang difungsikan untuk menjalin interaksi antara perusahaan dengan pemilik lahan maupun buruh perkebunan. Khusus dalam pengelolaan tembakau *Vorstenlanden*, hingga kini tercatat lima macam sistem pengusahaan yang pernah dikembangkan. Lihat Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Sistem Pengusahaan Tembakau *Vorstenlanden* 1962-2008

Periode	Luas (Hektar)	Sistem Pengusahaan
1962-1969	932-1.897	Kolektif
1970-1979	1.573-1.903	Sewa
1980-1982	1.638-1.860	TVI-Jasa
1983-2001	700-1.200	ITVL
2002-sekarang	700-900	KTVL

Sumber: *Arsip PTPN X 2005:5*

Untuk menjelaskan Tabel 3, Madenar seorang wakil petani tembakau *Vorstenlanden* dalam "Workshop Pemberdayaan Petani dan Buruh Tani Tembakau di Klaten dalam Mengantisipasi Peluang Perdagangan Tembakau Internasional: Perspektif *Fair Trade*", membaginya dalam dua rentang waktu, yakni pada periode sebelum reformasi dan sesudah reformasi. Madenar menuliskan pembagian tersebut dalam artikel berjudul "Melongok ke Belakang, Menatap Masa Depan: Pengalaman Petani Tembakau *Vorstenlanden* dalam Kerjasama dengan Perusahaan Perkebunan Tembakau".

Sebelum mengetahui pembagian menurut Madenar, perlu diperhatikan dahulu model pembagian Madenar dengan "reformasi" sebagai titik kisarnya. Penekanan ke titik kisar ini akan memberikan pemahaman terkait pemberdayaan petani dari sistem yang eksploitatif. Selain itu, kecenderungan sikap kalangan petani yang direpresentasikan dari argumen-argumen Madenar pun dapat dianalisis dari model pembagian berikut ini.

A. Periode Sebelum Reformasi

Pada masa sebelum reformasi, dari 1962 sampai 1997 atau selama tiga puluh lima tahun pengelolaan tembakau *Vorstenlanden* oleh perusahaan perkebunan negara, Madenar menyebutkan, terdapat (1) sistem kolektif dan (2) sistem sewa, TVI dan ITVL.

Penerapan sistem kolektif, sistem pertama yang dipakai perusahaan perkebunan negara setelah nasionalisasi, memiliki keterkaitan dengan latar belakang sejarah sebelumnya. Mulanya, selama tiga dasawarsa setelah kemerdekaan, masalah tanah terjadi secara terus menerus dan sulit dipecahkan. Penghapusan hak konversi yang diberikan Kasunanan Surakarta pada perusahaan Belanda, dihapus pada 1950 (Padmo, Soegijanto dan Djatmiko, Edhie 1991:86). Dampaknya hingga kini, untuk mencari tanah sebagai

areal penanaman tembakau *Vorstenlanden*, perusahaan perkebunan negara harus melakukan hubungan langsung dengan petani.

Sebagian besar petani di Klaten pun menolak untuk menyewakan tanahnya ke perusahaan milik Belanda, yakni NV KCM (Padmo, Soegijanto dan Djatmiko, Edhie 1991:86). Petani di Klaten masih mengasosiasikan penanaman tembakau cerutu dengan pemerintah kolonial, sehingga menganggap tidak ada perbedaan dengan perusahaan perkebunan lama pada masa kolialisasi Belanda (Padmo, Soegijanto dan Djatmiko, Edhie 1991:73-74). Seperti diketahui, kala itu, pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan model organisasi produksi dalam pengusahaan tanaman perdagangan, seperti tebu dan tembakau, yang kemudian disebut dengan sistem kolektif.

Dalam sistem kolektif, perusahaan perkebunan NV KCM, yang kemudian menjadi PPN, memberi bantuan kepada petani berupa kredit, bibit, dan pupuk. Kegiatan pengolahan tanah, pengusahaan tanaman tembakau sampai pengeringan daun tembakau di los pengeringan menjadi tanggung jawab petani, meskipun perusahaan masih mempunyai kesempatan memberikan nasehat dan bimbingan. Namun, karena petani pada dasarnya masih menolak menyerahkan tanahnya kepada perusahaan perkebunan, rencana ini pun mengalami kegagalan (Padmo, Soegijanto dan Djatmiko, Edhie 1991: 73-74).

Mengenai sistem kolektif yang berlangsung mulai 1962 hingga 1969 ini, menurut pandangan Madenar,

Petani menyerahkan lahan sawahnya kepada PNP di bawah perintah SK Bupati. Pada masa itu, petani aktif dalam mengusahakan tanaman tembakau, yaitu sejak buka areal, pembibitan, pengolahan tanah, penanaman, perawatan, petik/panen, pengeringan dalam los, bahkan penimbangan dilakukan sendiri oleh petani, sedangkan pengelolaan selanjutnya dilakukan PNP.⁶

Sistem kolektif memberikan keleluasaan bagi petani dalam menggarap lahannya sendiri. Selain sebagai pemilik lahan, petani juga berstatus buruh lahan yang setiap hari bergelut dengan aktivitas penanaman tembakau *Vorstenlanden*. Namun, aktivitas petani di lahan tetap berada di bawah pengawasan perusahaan. Hal itu berkaitan dengan sistem pelaksanaan perkebunan yang masih mengadopsi sistem perkebunan sebelumnya atau masih menerapkan pakem warisan kolonial. Pelaksanaannya berwujud dengan adanya mandor yang merupakan wakil perusahaan untuk mengawasi petani agar sesuai dengan baku teknis penanaman yang diinginkan perusahaan.

⁶ Madenar, ditulis dalam artikel "Melongok ke Belakang, Menatap Masa Depan: Pengalaman Petani Tembakau *Vorstenlanden* dalam Kerjasama dengan Perusahaan Perkebunan Tembakau", pada "Workshop Pemberdayaan Petani dan Buruh Tani Tembakau di Klaten dalam Mengantisipasi Peluang Perdagangan Tembakau Internasional: Perspektif *Fair Trade*", 1998.

Lantaran mengalami kegagalan yang disebabkan kesulitan penyerahan lahan dari petani, pada 1954, beberapa perubahan dilakukan, yakni dengan diperkenalkannya perantara (*tussen persoon*) ke dalam sistem kolektif sebagai agen yang berhubungan langsung dengan petani atas nama perusahaan perkebunan dengan maksud mengajak mereka menanam tembakau (Padmo, Soegijanto dan Djatmiko, Edhie 1991:34). Dalam sistem baru ini, kegiatan produksi menjadi tanggung jawab petani sepenuhnya, sedangkan *processing* tembakau ditangani perusahaan perkebunan secara langsung. Di samping itu, petani masih memunyai hak 50 persen dari tembakau kering yang dihasilkan, tetapi diwajibkan menjualnya ke perusahaan perkebunan dengan harga yang ditetapkan perusahaan (Padmo, Soegijanto dan Djatmiko, Edhie 1991:34). Penentuan harga dilakukan setiap tahun dengan patokan harga beras yang berlaku pada Desember (Padmo, Soegijanto dan Djatmiko, Edhie 1991:34).

Sistem kolektif yang dimodifikasi tersebut diterapkan hanya sampai 1969. Pasalnya, perusahaan milik pemerintah mengalami kesulitan dalam merumuskan harga tembakau dengan patokan harga beras yang harus dibayarkan kepada petani. Saat itu, harga beras mengalami kenaikan sangat tinggi sehingga perusahaan tidak mampu membayarkan harga tembakau kepada petani.

Meski demikian, produktivitas tembakau *Vorstenlanden* kala itu terbilang lebih tinggi dibandingkan masa sekarang. Tetapi, hasil yang tinggi belum menjamin pendapatan yang diterima petani juga tinggi. Penyebabnya adalah harga tembakau yang ditentukan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Klaten tergolong rendah dan manipulatif. Alhasil, ketika petani menerima uang pembayaran, itu hanya cukup untuk mengembalikan hutang yang sebelumnya dipinjam guna memenuhi kebutuhan rumah tangga selama musin tanam tembakau. Sehingga, pola kehidupan subsisten petani tembakau *Vorstenlanden* tetap terjadi. Madenar mengisahkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, petani menerima uang sebagai upah atas kerjanya dari PNP setelah selesai tahapan kerjanya. Tetapi, karena upah yang diterima tersebut jumlahnya kecil, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, petani masih mencari hutangan (Padmo, Soegijanto dan Djatmiko, Edhie 1991:34).

Dengan demikian, pada masa penerapan sistem kolektif tersebut, masyarakat petani miskin tetap berada di pinggiran aktivitas ekonomi kapitalis, sebagaimana studi W. F. Wertheim terhadap dampak sistem ekonomi kapitalis di Indonesia pada awal masa kemerdekaan (Wertheim, W. F 1964:67-71). Petani pun tetap mempertahankan sifat "pasif" terhadap serbuan ekonomi uang—situasi yang tidak berbeda dengan petani Jawa pada abad XIX. Terma "pasif" itu diilustrasikan Wertheim—mengandung pengertian bahwa petani tetap bertahan memenuhi kebutuhannya sendiri, mencari pendapatan lain jika terpaksa, dan coba mencari sedikit tambahan jika kondisi sama sekali bebas, tapi dipekerjakan oleh suatu usaha milik Barat (Wertheim, W. F 1999:67-70).

Memang, dijumpai dalam beberapa hasil penelitian mengenai kehidupan perkebunan pada masa kolonial, lingkungan perkebunan kerap digambarkan sebagai miniatur dari struktur kekuasaan yang hierarkis dan represif serta struktur sosial yang sengaja diciptakan penguasa perkebunan (Effendhie, Machmoed 1993:2-3). Menurut Machmoed Effendhie, selain untuk melindungi kepentingan pemilik modal sekaligus

mempertahankan pemasukan devisa melalui perkebunan, hal itu dimaksudkan juga untuk membentuk struktur kekuasaan sebagai upaya melanggengkan mekanisme eksploitasi guna menekan biaya produksi semurah mungkin (Effendhie, Machmoed 1993:3). Situasi sebagaimana dipaparkan Machmoed Effendhie tersebut masih bertahan sampai pada sistem-sistem perusahaan tembakau *Vorstenlanden* berikutnya.

Termasuk sejak tahun 1969, selama sembilan tahun setelah itu, dari tahun 1970 sampai tahun 1979, sistem perusahaan tembakau *Vorstenlanden* menggunakan sistem sewa. Sistem yang dimulai pada musim tanam tahun 1969/1970 ini merupakan pengganti dari sistem kolektif yang disempurnakan. Dalam sistem sewa ini, perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kegiatan produksi dan *processing* tembakau.

Namun, sistem sewa ini mengandung masalah dalam bentuk lain, yakni petani seringkali memperlambat penyerahan tanah ke perusahaan perkebunan sehingga mengganggu kegiatan pengolahan tanah dan tahapan penanaman tembakau selanjutnya. Tibalah, pada periode tahun 1970-1980, masalah yang dihadapi sistem sewa mencapai puncaknya (Padmo, Soegijanto dan Djatmiko, Edhi 1991:87). Perubahan pun dilakukan dengan diperkenalkannya sistem baru yang mirip dengan sistem Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) pada sistem perusahaan tanaman tebu (Padmo, Soegijanto dan Djatmiko, Edhi 1991:87)⁷, yakni sistem TVI (Tembakau *Vorstenlanden* Intensifikasi).

Selanjutnya, secara berurutan, sistem TVI (Tembakau *Vorstenlanden* Intensifikasi) dipakai sepanjang tahun 1980 sampai tahun 1982 (tiga tahun) dan ITVL (Intensifikasi Tembakau *Vorstenlanden*) digunakan mulai tahun 1983 sampai tahun 1997 (empat belas tahun). Dari sudut pandang petani, baik sistem sewa, TVI, maupun ITVL, ternyata dimasukkan dalam satu kelompok tersendiri. Pijakan argumentasinya adalah ketiga sistem tersebut dipandang telah mengabaikan hak petani sebagai pemilik lahan.

Dari segi aktor, yakni sosok Madenar yang ditahbiskan sebagai juru bicara sekaligus wakil petani, Madenar tidak terlalu mementingkan pendefinisian sistem perusahaan secara satu per satu. Dia cenderung melihat setiap sistem perusahaan dari sudut pandang petani, terkait dengan perlakuan sistem terhadap kehidupan petani. Karena itu, untuk masa sebelum reformasi, Madenar tidak membagi sistem perusahaan tembakau dalam empat masa, tetapi dikelompokkan dan disederhanakan dalam dua sistem. Sesuai dengan uraiannya:

...terdapat pemasangan hak petani dalam bentuk kerja sama yang dituangkan dalam SK Bupati yang meliputi: serah areal, pemberian uang *vorskot*, jaminan minimal, *ajon-ajon*, harga tembakau, dan baku teknis penggarapan. Petani tidak memiliki suara sekecil apapun untuk teribat dalam

⁷Mengenai TRI, Padmo menjelaskan, berkaitan dengan produksi beras yang melimpah kala itu. Ia mengisahkan, "Naiknya produksi beras pada 1970-an membuat tanaman padi menjadi lebih menguntungkan petani karena mereka bisa menanam padi tiga kali per tahun daripada menyewakan tanahnya ke pabrik gula. Diperkenalkannya sistem Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) pada tahun 1975 dimaksudkan untuk memecahkan masalah ini, yakni dengan memberikan tanggung jawab penanaman tebu kepada petani; kecenderungan yang sangat berbeda terjadi pada perusahaan tembakau *Vorstenlanden*."

penentuan SK. Pertimbangan bupati adalah masukan dari organisasi yang mengatasnamakan wakil petani yang bernama HKTI. Kenyataannya, HKTI yang merupakan tumpuan harapan petani, tidak membela kepentingan petani, tetapi kepentingan penguasa. Selama masa ini, kerugian yang diderita petani sangat besar dan petani merasa *ora diuwongke*. Dalam tahap awal penanaman, petani dikejar-kejar untuk segera menyerahkan areal lahannya. Meskipun padi belum tua, petani sesegera mungkin untuk memanen. Tetapi, pada tahap menerima hasil akhir, petani harus *nrimo ing pandum* atas kemurahan perusahaan dan aparat birokrasi. Selama masa tersebut, petani hanya “pasrah menunggu nasib dan meneguhkan do’a semoga masih bisa bertahan hidup selama masa tujuh bulan”.

B. Periode Setelah Reformasi

Pada masa setelah reformasi, sistem pengusahaan masih menggunakan sistem ITVL. Namun mulai musim tanam tahun 1998/1999, petani mulai dilibatkan dalam penentuan harga, walaupun untuk ketentuan lainnya masih mengacu pada SK Bupati. Momentum lengser *keprabon*-nya Soeharto dimanfaatkan petani untuk mengubah sistem pengusahaan yang sedang diterapkan. Dalam sistem ITVL, harga beli tembakau dan luas areal perkebunan ditentukan secara sepihak melalui SK Bupati. “Sepihak” diartikan sebagai absennya keterlibatan petani secara langsung pada saat perundingan. Sebab sebelumnya terdapat perundingan antara PTPN X dengan HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), dimana HKTI menjadi instrumen kontrol negara di sektor pertanian dan pangan yang dibentuk pemerintahan Orde Baru. Dalam pelaksanaan teknis untuk menyokong perundingan tersebut, aparat birokratis desa juga terlibat dalam pengesahan lahan milik petani yang berada dalam ruang administratif desa tertentu.

Sembari mengingat pengalaman satu dasawarsa yang lalu itu, Madenar menilai, telah ada satu kejadian yang patut diartikan sebagai perubahan yang signifikan. Satu perubahan yang digagas petani untuk mengubah sistem ITVL agar dapat melibatkan secara langsung keberadaan petani. Pada saat itu, petani telah dapat duduk sebangku dengan PTPN X untuk merundingkan penentuan harga tembakau yang sedang dipanen. Meskipun antara VBN dan NO dilakukan secara terpisah, hasilnya sedikit membuat lega petani (Padmo, Soegijanto dan Djatmiko, Edhi 1991:87).

Setahun berselang, pada musim tanam tahun 1999/2000, ketika pengelohan untuk tembakau VBN sedang dikerjakan, petani pemilik lahan dari 29 desa di Klaten yang termasuk areal penanaman tembakau, membentuk Forum Petani Tembakau *Vorstenlanden* (FPTV). Sejak saat itulah, dimulai perundingan dengan PTPN X untuk menentukan semua ketentuan penanaman. Adanya proses negosiasi ini disebut Madenar sebagai “penentuan nasib petani sendiri” (Padmo, Soegijanto dan Djatmiko, Edhi 1991:87). Hasil perundingan tersebut kemudian menggantikan peran SK Bupati dan dituangkan dalam Berita Acara Perundingan yang ditandatangani wakil-wakil petani bersama PTPN X.

Dalam perkembangannya, sejak tahun 2002, interaksi kemitraan antara PTPN X dan petani tembakau *Vorstenlanden* secara legal formal tertuang dalam perjanjian KTVL yang melibatkan dua pihak (tidak lagi sepihak). Inilah yang membedakan dengan sistem sebelumnya, di mana pada tahun 1983 sampai tahun 2001, sistem perusahaan tembakau *Vorstenlanden* dikenal dengan sebutan ITVL (lihat Tabel 1). Adanya perubahan dari ITVL ke KTVL, menurut Kepala Bagian Tanaman Unit Tembakau Klaten PTPN X Murtono, hanya sebatas pergantian peristilahan.

Itu hanya pergantian nama. Kemitraan *kan* sebagai sahabat, sebagai teman. Mungkin kalau PTPN X merasa sesuatu agak berat, petani *ya* merasakan. Bukan *kok nuntut* harga tinggi saja. Kalau petani mengalami kesulitan, mungkin harga padinya rendah, *kan* ada kontribusi dari PTPN X untuk sarana pertanian desa (Murtono 2008, wawancara, 27 April).

Tuntutan FPTV berintikan agar seluruh proses penanaman tembakau *Vorstenlanden* dilandasi dengan perjanjian kemitraan yang melibatkan petani dan PTPN X. Adanya model "menuntut" dari petani ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Pasalnya, sebelum tahun 1998, pihak yang berunding dengan PTPN X adalah HKTU. Usai HKTU mengadakan perundingan, turunlah SK Bupati yang berisi ketentuan tentang area penanaman dan harga tembakau *Vorstenlanden*.

Sistem KTVL merupakan program penanaman tembakau cerutu yang dilakukan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan mutu tembakau cerutu dengan menerapkan teknologi yang dianjurkan PTPN X, yakni "Septa Usaha Budidaya Tanaman Tembakau Cerutu". Program ini diturunkan dalam bentuk langkah-langkah teknis dengan tahapan sebagai berikut:

1. pemakaian benih unggul;
2. pengolahan tanah yang baik sesuai baku teknis;
3. pemberian air sesuai kebutuhan tanaman;
4. penggunaan pupuk yang mencakup enam tepat, yakni tepat dosis, tepat jumlah, tepat waktu, tepat musim, tepat jenis, dan tepat cara.
5. perlindungan tanaman terhadap gulma, hama, dan penyakit tanaman yang merugikan dilaksanakan secara bijaksana;
6. pemungutan dan pengolahan hasil yang tepat, dan;
7. pemasaran hasil yang terjamin (Arsip PTPN X 2005:6).

Model penanaman tersebut merupakan uraian aturan baku yang birokratis-instruktif, bersifat sebagaimana model kebijakan yang sering disosialisasikan pemerintahan Orde Baru terkait pembangunan sektor pertanian dan pangan. Seperti "Panca Usaha Tani" maupun "Septa Usaha Tani" yang dikampanyekan secara massif pada masa pemerintahan Orde Baru, bahkan hingga aras masyarakat pedesaan, "Septa Usaha Budidaya Tanaman Tembakau Cerutu" pun dikonstruksikan PTPN X yang merupakan elemen

negara dengan otoritas terhadap peningkatan produktivitas dan mutu komoditas. Posisi tersebut menuntut peran instruktif, birokratis, dan kaku yang mesti dijadikan acuan penerapan program KTVL. Dengan begitu, kehidupan dan nasib petani selalu bergantung pada sistem tersebut, sehingga petani tidak berkesempatan untuk meningkatkan pengetahuan, informasi, dan pengembangan diri.

Secara ideal, tujuh pola baku itu merupakan perangkat kinerja teknis-lapangan yang ditujukan untuk (1) meningkatkan pendapatan petani peserta KTVL, (2) memperluas lapangan kerja, (3) meningkatkan produktivitas dan mutu hasil, dan (4) meningkatkan pendapatan dan devisa negara (Arsip PTPN X 2005:7). Sesuai urutan tujuan tersebut, dua tujuan pertama ditujukan pada kelompok petani, supaya peran perusahaan negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tampak menjadi yang paling diutamakan. Kepentingan perusahaan maupun negara, sebagaimana disebutkan dalam tujuan ketiga dan keempat, tidak ditempatkan pada posisi yang teratas atau yang lebih diutamakan. Namun dalam pelaksanaannya, kepentingan dan keuntungan bagi perusahaan lebih diprioritaskan daripada kamanfaatan terhadap kesejahteraan petani.

Sebenarnya, baik ITVL maupun KTVL, dalam penerapan teknisnya, memang tidak ada perubahan signifikan. Subagio selaku Kepala Bagian Pengolahan Unit Tembakau Klaten PTPN X menjelaskan sebagai berikut.

Di lapangan, secara spesifik, tidak ada perubahan dari ITVL ke KTVL. Hanya istilah. Sebelum mulai, kita adakan perundingan untuk menentukan berapa harga yang disepakati. Dulu ada sewa, ada juga kolektif. Sekarang ya ada sewa, tapi namanya bukan sewa, tapi IPL (Imbalan Pemakaian Lahan). IPL tidak disepakati lewat berita acara. Itu di luar perundingan dengan FPTV.⁸

Meskipun mekanisme ITVL dan KTVL dipersepsikan seragam oleh PTPN X, tetapi perubahan krusial pada tahun 1998 dengan terbentuknya FPTV sebagaimana disebutkan di atas, perlu mendapat penekanan khusus. Pasalnya semenjak itulah dalam kerja sama penanaman tembakau *Vorstenlanden*, FPTV selalu menyodorkan tuntutan ke PTPN X sebagai wujud konkret keberpihakan pada petani dan buruh perkebunan. Demikianlah manifestasi ideologis yang berakar (terpantik) dari munculnya keresahan kolektif petani di lahan perkebunan tembakau *Vorstenlanden*. FPTV merupakan katup organisasi yang memegang peranan signifikan terhadap lahirnya gerakan sosial petani tembakau *Vorstenlanden*.

⁸ Wawancara, 27 April 2008.

BAB IV

Rekam Jejak FPTV

“Didiklah rakyat dengan organisasi, dan didiklah penguasa dengan perlawanan.”
(Pramoedya Ananta Toer, dalam *Jejak Langkah*)

Sejarah petani di Indonesia selalu dihiasi dengan ketertindasan. Ini sebenarnya tidak mengherankan, sebagaimana pemikiran Karl Marx, di mana kaum proletar (kaum marginal) diidentikan dengan buruh dan kaum tani. Dalam hal ini, petani tembakau *Vorstenlanden* di Klaten merupakan contoh kaum tani yang selalu tertindas dari waktu ke waktu. Dari era feodal dan kolonial, sampai era Orde Baru, masih menunjukkan hal yang sama, yakni selalu ada pemaksaan terhadap hak-hak petani. Bentuk-bentuk pemaksaan oleh struktur kekuasaan negara zaman Orde Baru, misalnya, dimulai dari pemaksaan tanam tembakau melalui SK Bupati sampai minimnya upah buruh perkebunan (dan gudang) yang jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK). Kondisi-kondisi ketertindasan demikianlah, kemudian saat momentum reformasi (yang ditandai dengan tumbangnya struktur kekuasaan otoritarian Soeharto), mentransformasikan diri menjadi gerakan sosial petani dalam bentuk Forum Petani Tembakau *Vorstenlanden* (FPTV).

Pembahasan dalam bab ini akan mengupas lebih jauh tentang FPTV. Bagaimana awal mula petani menginisiasikan gerakan, siapa aktornya, strategi (advokasi) yang digunakan, juga isu-isu yang diangkat, akan menjadi pembahasan utama dalam bab ini. Gerakan FPTV yang lahir dari rahim reformasi, menjadi menarik untuk dibahas. Sebab, tidak sebagaimana gerakan petani umumnya, yang hanya berjalan insidental, kenyataan FPTV mampu menciptakan struktur baru dalam pola interaksi petani dan korporasi, dalam hal ini korporasi diwakili oleh PTPN X.

A. Sejarah Awal Kelahiran FPTV

Gagasan pembentukan FPTV bermula dari pelatihan “Pola Relasi Gender di Pedesaan dan Pertanian” yang diselenggarakan Mitra Tani (Tryas Prasetya 2008, wawancara 5 Agustus)⁹ dalam rangkaian kegiatan yang disebut dengan Sekolah Lapang Petani (SLP) di Desa Towangsan, Gantiwarno, Klaten, pada April 1998. Sekolah ini mulai diselenggarakan pada pertengahan 1996 dan merupakan awal dari interaksi Mitra Tani dengan petani tembakau *Vorstenlanden*. Pada mulanya, SLP mengadakan program-program yang arahnya inovasi pengembangan teknologi, seperti teknologi *subtainable* yang ramah lingkungan. Cara demikian sebenarnya bisa dipahami, sebab kondisi negara saat itu masih mengadopsi sistem otoritarian. Sehingga, jika sejak awal digagas untuk membangun kesadaran kolektif petani¹⁰, maka bisa jadi telah dilibas habis oleh aparatur negara, baik dari kalangan birokratis (pejabat pemerintah daerah) maupun militer (polisi ataupun tentara)(Tryas Prasetya 2008, wawancara 5 Agustus).

Dalam pelatihan “Pola Relasi Gender” ini didapati kenyataan bahwa ada ketimpangan pola hubungan PTPN X dengan petani dan buruh perkebunan dalam pengelolaan tanaman tembakau *Vorstenlanden*. Berdasarkan informasi dan diskusi selama pelatihan, setidaknya ada tiga isu utama yang diperjuangkan. Pertama, rendahnya nilai tukar daun tembakau kering sebagai ganti uang sewa lahan. Hal ini mengacu pada kondisi krisis moneter 1998 yang melanda Indonesia dan menyebabkan nilai tukar rupiah jatuh pada angka yang sangat rendah. Logikanya, jika kurs rupiah turun, maka komoditas ekspor akan mengalami kenaikan harga yang tinggi. Namun, kenyataan itu tidak membuat harga tembakau yang dibeli PTPN X dari petani ikut naik. Saat itu, harga tembakau yang ditetapkan PTPN X masih tetap sama, yaitu Rp1.800 untuk *Na Oogst* dan Rp1.850 untuk VBN. Kedua, upah buruh tani dan gudang masih jauh di bawah UMK (pada waktu itu). Ketiga, adanya diskriminasi terhadap upah buruh perempuan, yakni upah perempuan jauh lebih rendah dari upah laki-laki (Sasono, Wening 2008, wawancara, 12 Juli).

Kondisi-konidisi demikian yang kemudian menginisiasikan gerakan yang lebih serius untuk memperjuangkan ketiga isu tersebut. Sehingga pada akhir pelatihan disepakati perlunya perjuangan untuk mengubah ketimpangan tersebut ke arah hubungan yang lebih adil. Supaya perjuangan tidak hanya dilakukan oleh satu desa (hanya petani Desa Towangsan), maka diputuskan memilih 4 orang peserta untuk mencari kawan dari lain desa yang memiliki masalah yang sama. Hasil kerja 4 orang tersebut adalah pada bulan Juni 1998 dapat mempertemukan 10 orang yang mewakili 3 desa dengan permasalahan yang sama.

⁹ Mitra Tani merupakan LSM Yogyakarta yang satu asosiasi dengan Insist Yogyakarta. Visi dasarnya adalah membangun gerakan petani di Indonesia. Meski wilayah kerjanya di seputar Yogyakarta, meliputi Kulon Progo, Magelang, Klaten, dan Sleman, Mitra Tani juga memiliki wilayah program sampai ke Jawa Timur, Jawa Barat, dan bahkan ke luar Pulau Jawa.

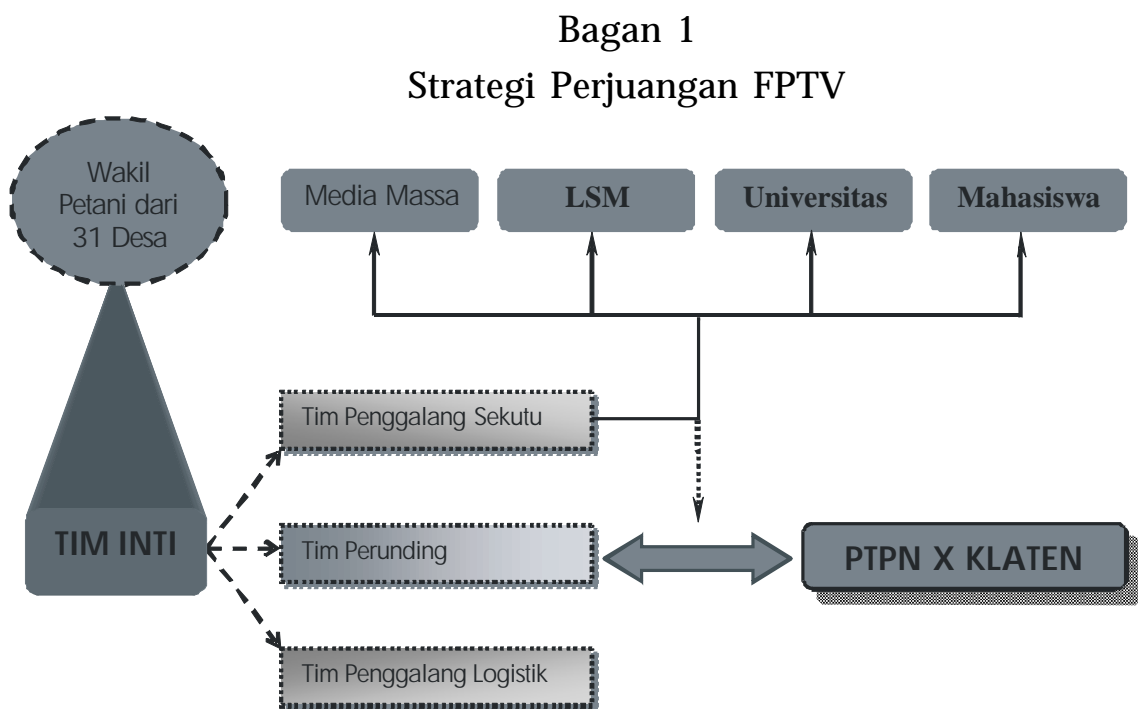
¹⁰ Kesadaran yang dimaksud adalah kesadaran akan ketertindasan. Kondisi ini mengacu pada terminologi Marx bahwa petani teralienasi dari alat produksinya sendiri. Pada kenyataannya, petani mendapat paksaan penyerahan lahan dan ketetapan harga yang rendah tanpa bisa menolak.

Melihat kondisi tersebut disadari bahwa perjuangan akan sangat berat jika dilakukan oleh petani dari 3 desa, sehingga diputuskan untuk memperluas permasalahan ke desa lain. Untuk mewujudkan hal itu, 10 orang yang hadir pada pertemuan masing-masing diharuskan menghubungi petani desa lain untuk diajak bertemu pada bulan Juli. Pertemuan tersebut dapat terlaksana pada pertengahan bulan Juli 1998 yang diikuti perwakilan dari 12 desa. Hingga pada titik terakhir mencapai jumlah 31 desa, yakni seluruh daerah penanaman tembakau *Vorstenlanden*. Pada pertemuan ini diputuskan perlunya perjuangan bersama untuk menuntut pada PTPN X.

Sebagai awal perjuangan, disepakati untuk mengadakan pertemuan yang lebih luas dan serius guna merumuskan tuntutan perbaikan hubungan yang setara dan saling menguntungkan antara petani dengan PTPN X. Sejak saat itu, dimulailah kesepakatan untuk membentuk tim inti perjuangan. Dengan disponsori Mitra Tani, diadakanlah pelatihan sekaligus persiapan perjuangan petani tembakau *Vorstenlanden* ke arah yang lebih real. Bulan Juni 1998 diadakan *workshop* di Kaliurang untuk merumuskan strategi perjuangan sekaligus penyamaan persepsi (kesadaran kolektif). Momen ini merupakan titik tolak awal terbentuknya FPTV sebagai paguyuban petani tembakau *Vorstenlanden*.

B. Strategi Perjuangan FPTV

Sebelum melangkah lebih jauh, sekaligus untuk mempermudah memahami penjelasan berikutnya, maka perhatikan bagan di bawah ini dengan lebih seksama.



KETERANGAN:

- > Garis Pembagian Peran —> Garis Jaringan Eksternal Juru Bicara
-> Garis Mandat Gagasan <=> Garis Negosiasi

Dalam *workshop* di Kaliurang, 31 desa yang memiliki areal tembakau *Vorstenlanden* masing-masing mengirim perwakilan satu atau dua orang, sesuai dengan jumlah kelompok tani yang ada di desa masing-masing. Wakil petani dari 31 desa inilah yang kemudian disebut tim inti. Tim inti ini dibagi ke dalam tiga bagian utama, yakni Tim Penggalang Sekutu (TPS), Tim Perundingan (TP), dan Tim Penggalang Logistik (TPL).

Setiap tim mempunyai tugas masing-masing. TPS memiliki tugas mencari koalisi (sekutu) dengan pihak lain untuk ikut berjuang mengusung gagasan (tuntutan) yang ingin dicapai petani tembakau *Vorstenlanden*. Sekutu-sekutu ini nanti memiliki signifikansi yang besar, baik dalam proses maupun hasil perjuangan. TP disiapkan untuk melakukan perundingan langsung dengan PTPN X dalam penentuan poin-poin kerja sama penanaman tembakau *Vorstenlanden*. Sementara itu, TPL tidak terlalu signifikan untuk dijelaskan, karena logistik saat itu sudah disediakan Mitra Tani juga PTPN X.

Bagaimana gerakan FPTV ini bisa sukses besar dalam merobohkan struktur kekuasaan patron –dalam hal ini PTPN X– padahal struktur itu telah bercokol bertahun-tahun? Selain karena momentum reformasi, jawabannya terletak pada efektifitas strategi yang digunakan, terutama yang dilakukan TPS dan TPL. Kedua tim ini merupakan kunci utama bagaimana tuntutan-tuntutan petani tembakau *Vorstenlanden* bisa dimobilisasi secara masif.

Apa yang dilakukan TPS, misalnya, membawa signifikansi yang besar yang mampu mendesak PTPN X untuk mengikuti apa yang ditentukan tim inti. Pencarian sekutu ini pertama kali dibangun saat sesi terakhir *workshop* di Kaliurang dalam pemaparan hasil *workshop* berupa tuntutan petani. Dalam acara itulah, berbagai pihak diundang untuk menghadirinya, di antaranya perguruan tinggi (khususnya Pusat Studi Asia Pasifik UGM), DPRD Klaten, wartawan, LSM (Walhi dan Mitra Tani), dan mahasiswa.

Bagaimana cara dan dampak (*impact*) yang dihasilkan oleh jaringan sekutu-sekutu ini? Penjelasan berikut akan memaparkan secara singkat.

1. Media Massa

Untuk memobilisasi gagasan perjuangan, media massa merupakan wadah yang tepat untuk menyampaikan gagasan kepada publik. Wartawan yang secara khusus dimintai kerja sama adalah Bambang M.,¹¹ meski ada beberapa wartawan yang sempat menulis berita tentang kasus tembakau *Vorstenlanden*. Bambang beberapa kali menurunkan hasil reportase yang penting bagi perjuangan tim inti. Dalam salah satu tulisannya di *Kontan* (Kontan 1999), yang berjudul “Kepulan Asap Tembakau, Derita Petani”, Bambang menyoroti kecurangan PTPN X dalam penentuan harga tembakau. Padahal, mestinya saat itu harga tembakau mencapai angka yang tinggi. Hal ini menjadi kekuatan penting bagi TP untuk menaikan tuntutan harga tembakau dalam perundingan dengan PTPN X. Selain itu, ada

¹¹ Bambang M., biasa dipanggil Bambang AJI karena Ketua Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta. Alumnus Hubungan Internasional, Fisipol, UGM.

beberapa tulisan¹² Bambang di koran *Kedaulatan Rakyat* yang juga membantu dalam proses perjuangan FPTV. Pemberitaan media massa ini memiliki pengaruh dalam pembentukan opini publik.

2. Perguruan Tinggi

Sekutu dengan perguruan tinggi secara khusus terkonsentrasi pada Pusat Studi Asia Pasifik (PSAP) UGM. PSAP inilah yang kemudian mengangkat isu petani tembakau *Vorstenlanden* menjadi kajian penelitian. Tim penelitian yang terdiri dari Dr. Suhardi, Dr. P.M. Laksono, Drs. M. Baiquni, M.A., dan Drs. Imam Prakoso ini mengangkat judul "Pemberdayaan Kelompok Petani Tembakau dan Buruh Tani di Klaten dalam Mengantisipasi Peluang Perdagangan Tembakau Internasional: Perspektif *Fair Trade*". Dalam laporan penelitian, disebutkan bahwa penelitian tersebut dibiayai Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, menurut Wening Swasono dan Tryas Prasetya, Mitra Tani telah menghubungkan Oxfam sebagai *funding* penelitian tersebut.¹³

Penelitian ini kemudian diseminarkan dan menjadi rekomendasi penting mengenai hubungan kerja yang ideal antara petani dengan PTPN X. Seminar tersebut merupakan mediasi awal untuk mencapai kesepakatan kerja sama dalam penanaman tembakau antara PTPN X dengan petani. Selain itu, PSAP juga menyediakan diskusi dengan pihak petani terkait dengan perumusan perjuangan yang ingin dicapai. Misalnya, diskusi tentang aspek sosiologis dan historis petani tembakau dari tahun ke tahun yang dibawakan Suhartono, PhD (Suhartono). Juga ada diskusi dengan Drs. H. Djamasri Adenan, M.A. terkait dengan perumusan sistem sewa yang adil, khususnya dalam konteks perkebunan tembakau di Klaten (Adenan Djamsari).

3. DPRD Klaten

DPRD Klaten terhitung sebagai sekutu karena pernah melakukan audiensi dengan petani terkait dengan ketertindasan petani akibat penetapan harga dan lahan tembakau dengan mekanisme SK Bupati. Pada Oktober 1998, Komisi B DPRD Klaten dan Dinas Pertanian Klaten memfasilitasi perundingan antara petani dengan pihak PTPN X. Dalam perundingan pertama ini dihasilkan beberapa keputusan yang mendasar, yakni pelaksanaan perundingan hanya dilakukan petani dengan PTPN X tanpa ada pihak ketiga, baik dari lembaga pemerintah, DPRD, maupun lembaga organisasi seperti HKTI. Hal ini juga menjadi akhir dari penentuan tanam tembakau melalui SK Bupati.

¹² Menurut Bambang, ada sekitar dua tulisan kecil dan dua tulisan panjang (sekitar setengah sampai satu halaman) di *Kedaulatan Rakyat*.

¹³ Hasil pencarian data memang menunjukkan bahwa penelitian ini memang dibiayai Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi untuk *funding* tambahan, Oxfam terlibat di dalamnya. Karena, sejak awal penelitian ini untuk tujuan advokasi.

4. Kampanye

Tim inti juga membangun koalisi dengan mahasiswa dan LSM, seperti Walhi dan Lopera. Mahasiswa dan LSM diharapkan bisa menjadi bagian dari sekutu yang mampu melakukan kampanye untuk mendesak tuntutan petani. Dalam *workshop* tersebut, mahasiswa, Walhi, dan Lopera siap memobilisasi demonstrasi jika dibutuhkan, meski dalam kenyataan mahasiswa, Walhi, dan Lopera tidak sempat melakukan aksi apapun. Selain itu, ada sambutan baik dari *Urban Development Program* (UDP) Yogyakarta yang ikut menyuarakan ketertindasan petani tembakau *Vorstenlanden* dengan beberapa komentarnya di media massa (Kontan 1999).

Seluruh elemen sekutu ini semakin lama semakin menjepit posisi PTPN X, hingga akhirnya perusahaan negara ini berkenan untuk duduk setara dalam sebuah perundingan. Dari semua hasil konsolidasi, mulai dari SLP, diskusi, seminar, bahkan pelatihan PSAP, petani dengan tegas menuntut beberapa persoalan. Beberapa tuntutan awal tersebut tercermin dalam tabel di bawah ini, sekaligus untuk melihat kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Klaten sebelumnya.

Tabel 4
Tuntutan Awal FPTV ke PTPN X

No.	Tuntutan awal FPTV ke PTPN
1.	Adanya perjanjian secara tertulis antara petani dengan pihak PTP X N syah secara hukum, sehingga tidak diperlukan SK Bupati untuk melindungi kerja PTP X N.
2.	Penanaman tembakau dilakukan secara blok, tidak hanya memilih lahan yang subur.
3.	Dalam pengadaan los pengering tembakau, penentuan nilai sewa lahan dilakukan secara langsung antara petani pemilik lahan dengan pihak PTP X N.
4.	Harga tembakau kering setara 2 \$ US dan ditentukan sebelum memasuki musim tanam
5.	Ada jaminan kegagalan panen yang nilainya nominalnya setara dengan harga 12 Kw tembakau kering untuk setiap Ha ² sawah.
6.	Ada biaya pemulihan lahan setelah penanaman tembakau yang nilainya setara dengan upah 60 HOK berdasarkan UMR yang berlaku untuk setiap Ha sawah.
7.	Melakukan pemuliaan tanah dengan menanam <i>Clotalaria Juncea</i> sebanyak 15 Kg benih untuk setiap Ha sawah secara merata di akhir musim tanam tembakau.
8.	Mengembalikan 5% keuntungan bersih PTP X N dari usaha tembakau kepada petani.
9.	Petani terlibat dalam pengawasan dalam seluruh proses produksi sampai pascapanen
10.	Buruh lahan diutamakan dari wilayah desa yang ditanami tembakau.
11.	Upah buruh sesuai UMR yang berlaku dan tidak ada diskriminasi upah antara buruh laki-laki dengan perempuan, perbedaan didasarkan atas jenis pekerjaan dan ketrampilan yang dikuasai buruh.
12.	Buruh mendapatkan jaminan kesehatan dan kecelakaan (askes).

C. Signifikansi Aktor Gerakan

Dalam hal perubahan struktur, Karl Marx membayangkan bahwa hanya revolusi yang bisa mengubah struktur kekuasaan. Dengan berpegang pada deterministik ekonomi (Ramli, Andi Muawiyah 2007)¹⁴, dilukiskan bahwa kapitalisme akan menunjukkan wajah bengisnya dan kaum proletar akan membentuk kesadaran kolektif untuk kemudian mentransformasikan menjadi sebuah gerakan revolusi. Berbeda dengan Antonio Gramsci, gagasan Marx dalam membangun revolusi seolah hanya berakhir dengan konsep kesadaran kolektif, padahal dalam kehidupan sosial-ekonomi ada kekuasaan yang mengukung tanpa disadari masyarakat tersebut. Ini yang kemudian dipopulerkan Gramsci dengan istilah hegemoni (Sugiono 2006:31)¹⁵. Sehingga, sumbangan yang diberikan Gramsci dalam pemikiran Marxis adalah kesadaran kolektif tidak muncul dengan sendirinya, tetapi harus dimunculkan. Di sinilah letak terpenting gagasan Gramsci mengenai intelektual organik (*organic intellectuals*) (Sugiono 2006:31).

Setiap kelompok sosial, yang muncul di kawasan orisinal sebuah fungsi esensial di dunia produksi ekonomi, menciptakan bersama dirinya sendiri, secara organik, satu atau lebih strata intelektual yang memberikan homogenitas dan kesadaran fungsinya sendiri tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang sosial politik (Sugiono 2006:43).

Dengan menggunakan cara pikir Gramsci tentang intelektual organik ini, kita dapat memetakan signifikansi aktor gerakan. Di mana intelektual organik dipahami sebagai orang yang memiliki kesadaran fungsi sosial yang muncul dikalangan kelompok (kelas) tertentu, dalam hal ini kelompok petani *Vorstenlanden*.

Wening Swasono¹⁶ merupakan salah satu orang yang patut dicatat sebagai aktor yang memiliki peran signifikan dalam gerakan FPTV. Wening yang memiliki kapasitas sebagai aktivis LSM yakni Mitra Tani dan Insist, merupakan penginisiasi awal diadakannya SLP. Sehingga, tidak aneh jika SLP sendiri pertama kali diadakan di Desa Towangsan, Gantiwarno yang merupakan asal desa Wening. Sebagaimana dijelaskan di muka, SLP merupakan embrio awal dari gerakan petani tembakau *Vorstenlanden* di Klaten. Dengan adanya SLP, petani memiliki pemahaman dan kesadaran tentang eksploitasi yang dilakukan PTPN X, baik dalam hal penanaman tembakau, upah buruh yang rendah, pembedaan upah yang bias gender, dan minimnya jaminan sosial yang diberikan perusahaan negara

¹⁴ Dijelaskan bawah ada dua lapisan struktur kekuasaan, yakni struktur bawah berupa ekonomi, yang merupakan penentu bagi struktur atas berupa hukum, politik, moral. Artinya, kehidupan sosial ekonomi-lah (*man social being*) yang menentukan terbentuknya kesadaran manusia (*man social consciousness*).

¹⁵ Jika kita sandingkan dengan pemikiran Karl Marx, hegemoni ini tidak jauh berbeda dengan dominasi. Hanya, jika dominasi itu bermula dari struktur ekonomi, maka hegemoni berpangkal pada kultural. Disini menjadi jelas bahwa terdapat perbedaan penempatan struktur atas-bawah antara Marx dan Gramsci. Lebih jauh Muhadi Sugionono menjelaskan, "di mata Gramsci, agar yang dikuasai mematuhi penguasa, yang dikuasai tidak hanya harus merasa mempunyai dan menginternalisasikan nilai-nilai serta norma penguasa, lebih dari itu mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka." Bisa dikatakan juga hegemoni merupakan 'kepemimpinan moral dan intelektual'.

¹⁶ Wening Swasono adalah seorang petani tembakau Desa Towangsan, Kecamatan Gantiwarno. Saat ini menjabat sebagai Ketua Forum Petani Tembakau *Vorstenlanden* (FPTV). Wening, begitu panggilan akrabnya, merupakan seorang aktivis LSM, yakni Mitra Tani dan Insist Yogya. Seorang alumnus Jurusan Pertanian Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Yogyakarta.

tersebut. Wening inilah yang sejak awal hingga sekarang selalu menginisiasikan gerakan petani, yang semula hanya terdapat di desanya saja, tetapi sekarang telah menjadi gerakan petani tembakau se-Klaten.

Karena memiliki peran signifikan pada awal pembentukan gerakan, Wening selalu dipercaya sebagai koordinator dalam setiap perundingan. Dari perundingan pertama sampai kesepuluh, Wening selalu menjadi tim perunding dari kalangan petani. Bahkan, ketika pada 2001 muncul forum kepala desa yang direncanakan menggantikan peran FPTV, sosok Wening jugalah yang pertama “pasang badan” dan menginisiasikan penolakan terhadap forum kepala desa yang didukung PTPN X tersebut. Sosok Wening inilah yang sesuai dengan sebutan intelektual organik, yakni orang yang memiliki kesadaran fungsi sosial kelompoknya, serta lahir dan hidup dalam kelompok tersebut, yakni petani Desa Towangsan khususnya dan petani tembakau *Vorstenlanden* Klaten pada umumnya.

Sosok kedua adalah Slamet¹⁷ seorang petani di Kecamatan Klaten Selatan yang juga merupakan tokoh pertama sampai sekarang yang selalu terlibat aktif dalam semua aktivitas FPTV. Saat ini Slamet menjabat sebagai sekretaris dalam struktur organisasi FPTV. Meski keterlibatannya bukan sebagai penggagas awal,¹⁸ Slamet merupakan tokoh yang memiliki peran signifikan dalam gerakan FPTV. Sebagai alumnus hukum, Slamet memiliki kapasitas untuk memahami dan menyebarkan ide-ide tentang ketimpangan dan diskriminasi PTPN X terhadap petani. Selain itu, tokoh ini merupakan organisator yang handal. Dalam struktur masyarakat desa yang masih berpola pikir tradisional, di mana sekretaris hanya dipahami sebagai urusan menulis surat, Slamet berkenan untuk menjabatnya. Namun, bagi Slamet, menulis dan menyebarkan surat bukan hal yang sia-sia, karena dari sana bisa menjadi awal dari konsolidasi.

Kuatnya peran tokoh ini bisa dipahami karena mereka memang berasal dari kalangan terdidik. Wening yang merupakan alumnus pertanian UPN Yogyakarta, sejak awal memang fokus pada pembangunan kesejahteraan petani melalui aktivitasnya di berbagai LSM, salah satunya adalah Mitra Tani. Sedangkan Slamet sebagai alumnus hukum, yang juga telah menyelesaikan studi master (S2) di Magister Kenotariatan UGM, jelas merupakan orang yang dibutuhkan dalam pengorganisasian gerakan. Apalagi, kedua orang ini juga bagian dari petani tembakau *Vorstenlanden*.

Jika melihat pada dua sosok ini, gagasan Gramsci tentang intelektual organik menjadi tepat. Sebenarnya, pertanyaan dasar Gramsci adalah kenyataan munculnya revolusi tidak pernah lahir dari kaum proletar secara *an sich*, tetapi diorganisasikan sekelompok intelektual organik. Intelektual organik ini bertujuan untuk memproduksi hegemoni baru, atau *counter hegemony* dari struktur lama, dalam hal ini hegemoni struktur lama dilakukan PTPN X selama puluhan tahun lamanya. Dua tokoh intelektual organik dari kalangan petani *Vorstenlanden* inilah yang berperan terhadap reproduksi hegemoni di lingkungan perkebunan tembakau.

¹⁷ Slamet merupakan petani di Kecamatan Klaten Selatan, sekarang menjabat sebagai Sekretaris FPTV. Umur 49 tahun. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Satya Wacana, dan telah menempuh studi master (S2) di Kenotariatan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

¹⁸ Penggagas awal adalah Mitra Tani melalui kegiatan SLP-nya. Wening Swasono bisa lebih disebut sebagai salah satu penggagas awal kelahiran FPTV, karena memang Wening adalah aktivis LSM tersebut.

Sebenarnya, tidak hanya Wening dan Slamet saja memiliki peran signifikan dalam organisasi. Heru, koordinator Kecamatan Gantiwarno, kakak dari Wening Swasono, juga merupakan aktor yang memiliki peran signifikan dalam gerakan. Heru memiliki akses ke partai politik, karena sempat mencalonkan sebagai anggota legislatif Klaten, sehingga memiliki kedekatan dengan beberapa pejabat penting di Klaten. Begitu pun dengan Madenar, koordinator Kecamatan Wedi, juga terlibat aktif baik di awal pergerakan sampai saat ini. Mulai dari wakil petani sebagai pembicara dalam seminar sampai tim perunding, Madenar pernah terlibat.

D. Pola Pengorganisasian

FPTV merupakan organisasi yang berbentuk paguyuban. Wening Swasono, Ketua FPTV mengatakan bahwa anggota forum tidak punya pemikiran untuk menjadikan FPTV sebagai organisasi formal yang berbadan hukum, memiliki visi-misi, dan program kerja yang sistematis. Sebagai paguyuban, tujuan FPTV hanya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka yang bergantung pada usaha perkebunan tembakau, yakni petani beserta buruhnya. Karena itu, aktivitas utama FPTV saat ini hanya dalam batas perundingan kemitraan.

Secara struktur organisasi, FPTV memiliki kepengurusan sebagai berikut.

Tabel 5
Struktur Organisasi FPTV

Ketua	:	Wening Swasono	
Sekretaris	:	Slamet	
Bendahara	:	Indarjo	
Koordinator per kecamatan	:		
☞ Gantiwarno	:	Heru	☞ Klaten Selatan : Dardi
☞ Jogonalan	:	Giri	☞ Karangnongko : Nyono Riyadi
☞ Wedi	:	Madenar	☞ Kebunaram : Sugiyono

Setiap koordinator berfungsi menjaring aspirasi petani di wilayah koordinasinya. Dalam satu kecamatan, terdapat beberapa desa dan setiap desa memiliki kelompok tani masing-masing. Cara koordinasi yang dilakukan biasanya dengan menyebarkan angket aspirasi kepada setiap kelompok tani. Dalam angket aspirasi tersebut terdapat poin-poin berikut: jaminan minimal, pengganti pemulihan lahan, uang muka, harga tembakau, dan kontribusi pembangunan desa.

Secara pendanaan, FPTV tidak membutuhkan terlalu banyak dana. Karena kebutuhan yang diperlukan hanya berupa makanan dan minuman ringan saat ada rapat atau pertemuan forum. Pendanaan ini dihitung sebagai berikut:

...kalau lahannya kurang dari 10 hektar, iurannya 50 ribu per tahun, kalau 10 sampai 20 hektar, iurannya 75 ribu per tahun, kemudian di atas 20 hektar sebesar 100 ribu per tahun, sebenarnya itu untuk biaya kita rapat-rapat. Misalnya kita rapat di mana, maka agar konsumsi tidak memberatkan salah satu anggota, kita gunakan dana dari iuran itu. Hanya itu kebutuhan FPTV terkait dengan urusan pendanaan (Sasono, Wening 2008, wawancara, 12 Juli).

Hingga kini, pengorganisasian di tubuh FPTV selalu digawangi oleh Wening dan Slamet. Dua orang itulah yang sejak *workshop* di Kaliurang selalu mengawal perjalanan FPTV serta aktif menjalin jaringan secara kultural dengan petani dari desa-desa di Klaten. Maka, kedua orang tersebut sudah selama sepuluh tahun memimpin gerakan petani tembakau *Vorstenlanden* dengan tetap menjaga semangat ideologis yang diusung.

Satu dekade ternyata memberikan keluhan tersendiri bagi Slamet dan Wening. Dua orang itu mengisahkan sulitnya melakukan regenerasi supaya perundingan petani dengan PTPN X dapat selalu digelar (Sasono, Wening dan Slamet 2008, wawancara, 12 Juli). Akhirnya, di tingkatan pengorganisasian, regenerasi kepemimpinan memang tersumbat yang dapat melahirkan kejenuhan di tingkatan aktor penginisiatif.

BAB V

Memutus Interaksi Patronklien: Sebentuk Pendedahan

*“...Di mana-mana, rakyat dipaksa, menjual tanah
tapi, tapi, tapi, tapi! Dengan harga murah
Di kota-kota, buruh dipaksa, bekerja keras
tapi, tapi, tapi, tapi! Dengan upah rendah...”*

(Apa Guna oleh Widji Thukul)

A. Menafsirkan FPTV sebagai Katup Gerakan Sosial

Forum Petani Tembakau *Vorstenlanden* (FPTV) merupakan forum pemersatuan gagasan petani tembakau *Vorstenlanden* di Klaten. Gagasan “pemersatuan” perlu dijadikan penanda tersendiri terkait dengan suara petani yang tidak pernah terakomodasi di tengah struktur birokrasi yang tertutup. Berangkat dari situlah, kemudian muncul beragam kesepihakan dan pengerdilan petani terhadap mata pencaharian dan hak-hak yang semestinya diterima. Dalam konteks petani tembakau *Vorstenlanden*, hak-hak tersebut menyangkut kesediaan/ketidaksediaan menyerahkan lahan, penentuan harga beli tembakau, serta upah buruh perkebunan antara laki-laki dan perempuan (lihat *Sejarah Awal Pembentukan FPTV* di Bab IV).

Dalam struktur pemerintahan Orde Baru, hal-hal itu menjadi tabu untuk dibicarakan, terlebih lagi untuk dinegosiasikan. Peran negara tampak begitu menyetir kehidupan petani. Terutama, ketika penentuan areal dan harga tembakau disepakati dalam perundingan antara PTPN X dan HKTl, untuk kemudian dituangkan dalam SK Bupati. Dalam proses itu (*Wajah Pengusahaan Tembakau Vorstenlanden* di Bab III), petani tidak diberikan ruang negosiasi sehingga tidak memiliki daya tawar sama sekali. Dengan demikian dalam kasus ini, kedaulatan petani benar-benar dipasung.

Di tengah situasi demikianlah, kelahiran FPTV merupakan “katup gerakan sosial” yang berhasil mengakomodasi suara petani untuk melawan birokratisasi struktur yang tertutup, bahkan dalam tahap tertentu, bisa saja represif. Mengapa disebut sebagai “katup gerakan sosial”? “Katup” di sini merupakan pengasosiasian yang relevan buat FPTV sebagai “sebuah forum, ruang pemersatuan”. Forum dalam kerangka apa? Yakni, gerakan sosial oleh petani, gerakan petani. Dalam gerakan sosial, kembali ke pendefinisian Sidney Tarrow (lihat, *Landasan Teori* di Bab I), terdapat tantangan kolektif oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan dan solidaritas yang sama, dalam konteks interaksi kelanjutan dengan kelompok elite, lawan, dan penguasa (Sidney, Tarrow 1998,4-5).

Menurut pendefinisian yang lain, Wahyudi menguraikan, gerakan sosial, termasuk di dalamnya gerakan petani, merupakan gerakan yang digawangi sekelompok orang secara kolektif, kontinyu, dan atau sistematis dengan tujuan mendukung atau menentang keberlakuan tata kehidupan tertentu. Aktor dari gerakan tersebut selalu diliputi beragam kepentingan, baik secara individu, kelompok, komunitas, atau level yang lebih luas lagi (Wahyudi 2005,6-7).

Melihat adanya unsur “kolektivitas” yang sifatnya jelas “melekat” dalam hakikat gerakan itu sendiri, maka gerakan sosial cenderung memerlukan dukungan jaringan. Untuk itu, Keun menyebutkan, mobilisasi terhadap partisipan gerakan sosial dapat dilakukan melalui mobilisasi personal dan kognitif (Wahyudi 2005,8). Berikut inilah, dirumuskan secara objektif, model mobilisasi personal dan kolektif dalam FPTV berkaitan dengan politik perjuangannya, yakni menerobos birokratisasi negara ala Orde Baru di aras lokal (Klaten).

1. Birokratisasi Negara

Agus Sudibyo mengatakan bahwa perlawanan petani selalu didasarkan pada persoalan bahwa negara, aparat keamanan, dan pemilik modal telah mengambil alih secara paksa surplus ekonomi dari petani (Wahyudi 2005,11). Dalam penanaman tembakau *Vorstenlanden*, PTPN X adalah representasi dari entitas negara yang juga tidak lepas dari dugaan (tuduhan) yang dikatakan Agus Sudibyo tersebut. Sebagai perusahaan negara, PTPN memang lahir dari rahim sebuah rezim negara dengan budaya politik yang represif. Di titik itulah sebenarnya masalah intern dalam tubuh PTPN berasal, yang turut berdampak pada persoalan jangka panjang terhadap perkembangan PTPN sendiri selama masa Orde Baru.

Logika demikian dengan mudah dapat dibaca dari berbagai literatur penelitian tentang perkebunan di Indonesia. Dalam kasus perkebunan tembakau *Vorstenlanden*, Soegijanto Padmo pernah menelusuri dari perspektif sejarah. Pada 1950-an, yakni masa awal perkembangan perusahaan perkebunan negara, iklim politik nasional terbukti memiliki pengaruh begitu signifikan. Padmo menjelaskan, kala itu, kelompok *vested interest* baru diciptakan kelompok elite baru yang terdiri dari pejabat pemerintah yang mengawasi perusahaan perkebunan. Pada gilirannya, mereka sangat dipengaruhi lingkungan sosial dan politik nasional. Pemimpin perusahaan perkebunan berada dalam posisi yang dipengaruhi kekuatan tertentu sejalan dengan kecondongan politik dari pejabat pemerintah,

perwira militer, dan pemimpin organisasi massa terhadap partai politik tertentu. PP Nomor 23 Tahun 1958, misalnya, secara tegas menyebutkan bahwa perwira militer bisa ditunjuk sebagai *manager* atau *administratur* perusahaan perkebunan (Padmo, Soegijanto dan Djatmiko, Edhie 1991:78).

Munculnya aktor militer dalam struktur perusahaan perkebunan negara merupakan budaya politik ala Orde Baru yang terjadi di awal perkembangan perusahaan perkebunan negara. PP Nomor 23 Tahun 1958 adalah bukti paling awal adanya birokratisasi negara yang sistemik, bahkan sejak pertama kali sektor perkebunan dikelola oleh negara. Tentara menjadi instrumen negara yang bisa dipergunakan sesuai dengan keinginan pemimpin politik Orde Baru. Tidak terkecuali, dalam memimpin perusahaan perkebunan. Inilah persoalan struktural yang sudah menjadi polemik sejak dari lahirnya PTPN.

Seiring dengan tidak bergantinya rezim, unsur birokratisasi negara benar-benar dipraktikkan dalam banyak hal di lingkungan perkebunan tembakau *Vorstenlanden*. Birokratisasi negara di sini memiliki pengertian kebiasaan dalam kebirokrasian yang kaku sehingga semua urusan menjadi lambat dan tertutup. Di situ, tidak ada ruang kompromi yang mempertemukan birokrat sebagai aktor representasi negara dengan masyarakat, termasuk petani. Tembok birokratisasi negara itulah yang hendak dirubuhkan petani tembakau *Vorstenlanden* lewat FPTV.

Apa unsur birokratisasi negara yang dimaksud? Yakni, penerbitan SK Bupati yang diputuskan secara sepihak, tanpa pelibatan langsung kalangan petani. Secara substansial, arus perlawanan petani dapat dilihat dalam tabel tuntutan FPTV berikut ini, mulai dari ketentuan yang sebelumnya diatur dalam SK Bupati sampai persoalan lain yang merupakan hak-hak petani. Model "menuntut" inilah yang dinamakan perlawanan petani terhadap birokratisasi negara yang berkembang pasca-Orde Baru. Dari tuntutan-tuntutan inilah, dapat ditelaah lebih lanjut terkait transformasi gerakan sosial petani kontemporer yang akan membedakannya dengan gerakan radikal petani pada masa Orde Baru (Kuntowijoyo 2002 dan Azhar, Ipong A. 1999).

Tabel 6
Materi Tuntutan FPTV pada PTPN X

No.	Materi yang Dirundingkan
1.	Batas waktu penyerahan dan pengembalian lahan.
2.	Jaminan minimal produksi (sesuai waktu penyerahan lahan) sebagai jaminan kegagalan panen.
3.	Uang ajon-ajon (uang untuk lahan yang diserahkan lebih awal dari waktu yang ditentukan).
4.	Penanaman <i>Crotalaria juncea</i> (Bahasa Jawa: <i>orok-orok</i>) untuk pemulihan kesuburan tanah pascapanen.
5.	Biaya pemulihan lahan yang harus ditanggung PTPN X.

No.	Materi yang Dirundingkan
6.	Pengolahan lahan yang harus sesuai baku teknis yang disepakati.
7.	Petani harus dilibatkan dalam pengawasan proses produksi, panen, dan pascapanen.
8.	Harga tembakau kering los.
9.	Uang muka bagi pemilik lahan.
10.	Tuntutan agar membagi laba bersih PTPN X kepada petani.
11.	Kontribusi pembangunan sarana pertanian.

Diolah dari: Tuntutan FPTV 2008

Tidak dengan menggunakan praktik kekerasan, seperti pembakaran tanaman di lahan perkebunan atau pembakaran los pengeringan daun tembakau¹⁹, FPTV bergerak dengan membentuk jaringan sekutu. Mengapa demikian? Di tengah goncangan perubahan politik nasional pada masa reformasi 1998, untuk melakukan perubahan sistemik bukanlah peluang yang mustahil. Pembacaan seperti itulah yang menunjukkan kematangan kolektivitas petani yang tidak ditemui pada pola gerakan radikal petani masa Orde Baru dan masa-masa sebelumnya. Selain karena negara, khususnya pemerintahan Orde Baru, lebih bersifat represif, terutama dengan dikendalikannya tentara sebagai instrumen pelaksana, juga karena pengalaman sosial petani yang belum banyak memberikan sentuhan pembelajaran gerakan.

Jika petani tetap memakai perlawanan dengan kekerasan, maka justru memperburuk situasi, tanpa adanya alternatif solusi yang dapat diperoleh. Bisa saja, petani semakin terpuruk di tengah situasi politik yang tidak terkendalikan. Hal itu tidak berbeda pula dengan perlawanan keseharian (*everyday resistance*) sebagaimana pernah ditunjukkan James Scott dalam buku *Senjatanya Orang-Orang Kalah* (Scott, James 2000). Jika tetap melakukan perlawanan keseharian, justru tidak memberikan pengaruh signifikan secara sistemik. Padahal, yang menjadi akar persoalan adalah sistem pengusahaan yang diterapkan.

Dari situ ingin dikatakan, kolektivitas petani lewat FPTV juga sudah diimbangi dengan kejelian menemukan fokus persoalan. Adanya SK Bupati merupakan manifestasi birokratisasi negara yang sudah menjadi budaya politik Orde Baru. Jika sumber pemerintahan Orde Baru secara nasional sedang terguncang, FPTV pun menafsirkannya sebagai peluang mengubah sistem di aras lokal. Dengan mengeluarkan sejumlah tuntutan sebagaimana disebutkan di atas, strategi menembus tembok birokratisasi negara di lingkungan tembakau *Vorstenlanden* akhirnya berjalan sukses. Bahkan, pengelolaan "jalan sukses" itu terawat sudah sepuluh tahun, terhitung sejak dimulai pada 1998.

¹⁹ Saat ini sebenarnya masih ada kebakaran los, seperti terdapat dalam data "Daftar Los Pengering Kebun Kebunarum/Gayampri/Wedi Birit, Posisi Per: 7 Agustus 2008". Dalam data tersebut dilaporkan, ada empat los yang terbakar. Namun, menurut Murtono, hal itu bukan sebagai bentuk perlawanan, tetapi bias berupa seorang yang mabuk, perasaan dendam dengan *mandor* atau *ziender* yang sifatnya lebih ke arah pribadi.

2. Konsekuensi Gerakan Sosial Petani

Gerakan petani tembakau *Vorstenlanden* memiliki dinamika sendiri dalam rangka mewujudkan suatu perubahan yang sistemik. Para aktornya menanggung beban memformulasikan strategi gerakan yang dalam tataran konseptual disebut konsekuensi gerakan. Sebuah konsekuensi mesti disebarluaskan ke sebanyak mungkin partisipan gerakan. Terkait kajian yang berfokus pada masa pembangunan gerakan ini, Harper menyebutkan, ada tiga macam konsekuensi gerakan sehingga dapat mengarah pada terwujudnya suatu perubahan. Pertama, terciptanya dramatisasi isu dan masalah-masalah sosial. Kedua, dilakukannya perubahan-perubahan tertentu dalam kebijakan sosial. Ketiga, ekspansi akses struktural pada sumber-sumber tertentu seperti pendidikan, ketenagakerjaan, dan pemeliharaan kesehatan (Wahyudi 1997:9).

Jika dilihat secara kronologis, FPTV menginisiasikan gerakan lewat proses yang disebut Emile Durkheim sebagai kesadaran kolektif (*collective cinsiousness*). Subjek yang dikenai dalam hal itu adalah petani tembakau *Vorstenlanden*, baik ke petani pemilik lahan maupun buruh perkebunan, lewat Sekolah Lapang Petani (SLP). Dalam SLP yang dimulai pada 1996 itulah, petani sedikit demi sedikit mulai memahami alasan-alasan ilmiah dalam pertanian, tidak hanya terkait penanaman tembakau *Vorstenlanden*, tetapi juga lingkungan sosial ekonomi yang tengah melingkupi kehidupan sehari-hari mereka. Salah satunya, ketika menjelang 1998, isu yang dibahas mulai menyentuh soal perbedaan upah antara buruh perkebunan laki-laki dan perempuan. Petani pun sadar dalam menilai hal tersebut sebagai persoalan ketimpangan atau ketidakadilan sosial.

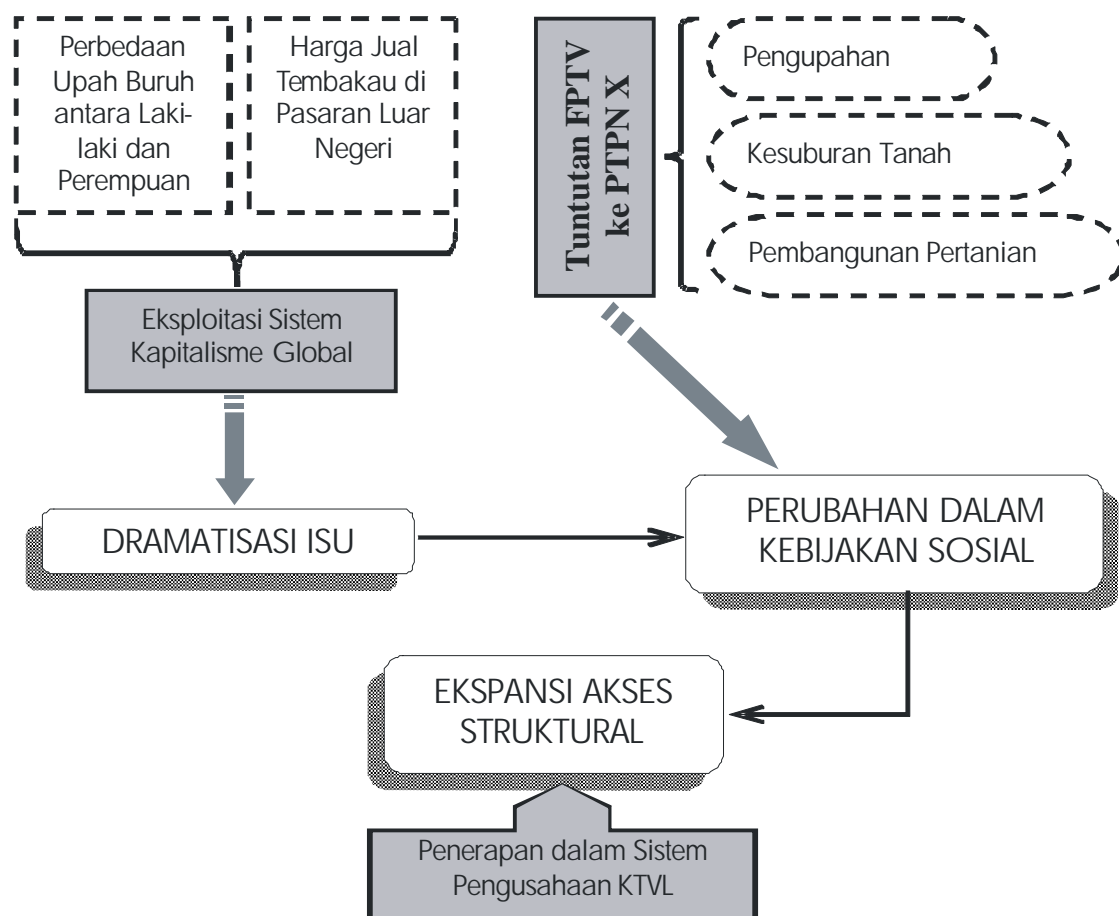
Ditambah lagi, terkait harga beli tembakau, pola pikir petani pemilik lahan juga sudah mengarah pada pembandingannya dengan harga jual di pasaran luar negeri atau harga lelang di Eropa. Kesadaran akan hal itu semakin kuat menyeruak ketika pada 1998 kurs rupiah anjlok dibandingkan dengan mata uang asing. Petani mulai memahami gejala tersebut dalam perspektif krisis ekonomi dan dampak perdagangan global terhadap mata pencaharian mereka. Pola pemikiran deduktif semacam itu tidak hanya harus dirumuskan mula-mula oleh para aktor gerakan, untuk setelah itu diinternalisasikan dalam benak petani keseluruhan, tetapi juga sebisa mungkin diperbincangkan setiap hari.

Membangun ekspektasi gerakan sedemikian rupa itu membutuhkan waktu lama. Maka, tidak salah jika fasilitator SLP mesti membutuhkan waktu tiga tahun untuk mengarahkan isu, mula-mula ke arah masalah yang sehari-hari dialami dan menyangkut kebutuhan primer petani, yakni upah buruh. Pada perkembangannya, semua itu "dikerangkai dalam satu tajuk", dalam istilah Harper disebut sebagai "dramatisasi isu", yakni eksploitasi petani dalam sistem kapitalisme global. Oleh para aktor FPTV, itulah yang mendasari dipergunakannya hasil penelitian PSAP sebagai strategi pamungkas sekaligus argumentasi ilmiah akademik akan perlunya pemberdayaan petani tembakau *Vorstenlanden*.

Selanjutnya, memahami poin kedua konsekuensi gerakan dalam perspektif Harper di muka, penting untuk membedahnya melalui substansi tuntutan FPTV ke PTPN X. Harper menyebutkan, poin kedua ini adalah perubahan dalam kebijakan sosial. Jika dikelompokkan, rumusan FPTV di atas adalah tuntutan perubahan akan kebijakan dalam pengupahan, kesuburan tanah, dan pembangunan pertanian.

Pertama, pengupahan, meliputi angka 2, 3, 8, dan 9 terkait dengan hak secara ekonomi yang seharusnya diterima petani. *Kedua*, kesuburan tanah, meliputi angka 1, 4, 5, dan 6 terkait dengan kepedulian PTPN X terkait aspek alam yang setiap hari digeluti petani. *Ketiga*, pembangunan pertanian, meliputi angka 7, 10, dan 11 terkait dengan tetap adanya keberpihakan terhadap pembangunan sektor pertanian yang kerap diabaikan pemerintah dalam era ekonomi industri dan jasa sekarang ini. Ketiga aspek tersebut merupakan tuntutan yang akan berdampak pada kebijakan sosial pertanian agar dapat menyentuh langsung ke jantung struktur, dalam bahasa Harper disebut sebagai "ekspansi akses struktural". Konkretnya yakni penerapan dalam sistem perusahaan KTVL. Alur logika di atas merupakan konsekuensi logis dari adanya ekspektasi realisasi perubahan yang sistemik. Semua itu dapat digambarkan menurut bagan berikut ini.

Bagan 2
Skematisasi Konsekuensi Gerakan FPTV



Dari uraian di atas, sebenarnya bisa dibaca juga pencapaian yang diperoleh FPTV sebagai sebuah gerakan sosial. Pemahaman Mansour Fakih dalam mengolah gagasan Gramsci tentang “perang manuver” dan “perang posisi” menunjukkan konsekuensi pertama (dramatisasi isu) dan kedua (perubahan kebijakan sosial) merupakan hasil dari perang manuver FPTV. Desakan FPTV untuk tuntutan-tuntutan yang bersifat jangka pendek, yakni tuntutan yang “saat itu harus dilaksanakan”, ternyata mampu mengubah struktur yang telah lama timpang. Jika perubahan jangka pendek telah dipenuhi, maka FPTV bisa beralih ke perang posisi, yakni perjuangan kultural jangka panjang. Hal ini tercermin dalam kondisi struktural perkebunan tembakau *Vorstenlanden* yang hingga saat ini telah bertahan selama satu dekade. Apalagi gerakan FPTV juga yang menjadi pendorong lahirnya gerakan-gerakan yang lain, seperti Forum Komunikasi dan Informasi Simpul Petani Klaten (FKISP)²⁰, Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK), dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan (advokasi air dari perusahaan Danone). Hal ini menunjukkan adanya jangkauan yang jauh ke depan, bukan sekedar kesejahteraan petani tembakau semata.

B. Menggugat Interaksi Patronklien, Mereproduksi Hegemoni

Dengan menggunakan kaca mata James Scott, interaksi patronklien digambarkan sebagai sebuah ikatan diadik (dua orang) yang bersifat dikotomis dan hierarkis, yakni terdiri dari mereka “yang lebih tinggi” (patron) dan “yang lebih rendah” (klien) (Scott, James 2000, 7-9). Dalam penelitian ini, telah dijelaskan bahwa petani selalu menjadi bagian dari “yang lebih rendah” (klien). Sementara itu, pihak perusahaan, terdiri dari pimpinan perusahaan, kepala bagian, *ziender*, *mandor*, bahkan pegawai perusahaan adalah bagian “yang lebih tinggi” (patron). Petani, sebagai pihak “yang lebih rendah”, dengan terang-terangan dipaksa untuk menyerahkan lahan melalui instrumen birokrasi berupa SK Bupati untuk ditanami tembakau dengan harga yang rendah. Begitu pun dengan buruh, selama bertahun-tahun selalu menerima upah di bawah standar UMK. Tidak salah jika di awal tulisan ini refleksi Widji Thukul dalam puisinya mengatakan, “...rakyat dipaksa, menjual tanah,...dengan harga murah, ...buruh dipaksa, bekerja keras,...dengan upah rendah”.

1. Menggugat Interaksi Patronklien: Gambaran Umum

Pertanyaannya kemudian, apakah hubungan diadik yang dikotomis dan hierarkis itu masih terjadi sampai saat itu? Adanya FPTV setidaknya telah banyak mereduksi hubungan “induk semang-klien”, bahasa Koentjaraningrat dalam mengilustrasikan hubungan patronklien, menjadi hubungan yang setara. Hal ini dibuktikan oleh beberapa alasan. *Pertama*, sistem pengusahaan tembakau *Vorstenlanden* saat ini dilebeli dengan istilah kemitraan (KVTL), artinya ada hubungan *partnership* antara petani dengan perusahaan PTPN X. Bahkan, kemitraan ini dikuatkan dalam kontrak perjanjian di atas materai.

²⁰ Wening Swasono terlibat di dalamnya, yakni sebagai Ketua FKISP. Begitu juga dengan Slamet yang merangkap sebagai Sekretaris FKISP.

Kedua, sejak penetapan tanam tembakau melalui mekanisme SK Bupati dihapus, tidak ada lagi pemaksaan untuk penanaman tembakau pada petani. Petani berhak menggunakan untuk apapun tanah yang dimilikinya. Bahkan, anggota FPTV sendiri diperkenankan untuk menolak menanam tembakau jika memang terdapat ketidaksetujuan dalam perjanjian. Artinya, meski telah terorganisasi dalam sebuah forum, petani masih memiliki independensi untuk mengolah tanahnya sendiri.

Ketiga, sifat hubungan tidak lagi mencerminkan hubungan “induk semang-klien”, tetapi merupakan pola kemitraan yang saling membutuhkan. Di satu sisi, petani memiliki kepentingan menanam tembakau agar kesuburan tanah bisa terjaga dengan pola tanam yang beragam. Di sisi lain, PTPN X tergantung pada petani yang memiliki akses tanah karena PTPN X tidak memiliki tanah sendiri. Tanpa ada pemaksaan tanam tembakau seperti dulu, hubungan kedua pihak menjadi saling membutuhkan satu dengan yang lainnya.

Kenyataan tersebut sebenarnya menyambung pada pemikiran Antonio Gramsci tentang reproduksi hegemoni. Lahirnya FPTV sebagai katup gerakan sosial telah memicu produksi hegemoni baru. Jika dulu struktur masyarakat petani tembakau *Vorstenlanden* selalu ditentukan oleh semua kebijakan PTPN X, kini tidaklah demikian. *Bargaining position* FPTV telah melahirkan struktur masyarakat petani baru yang tidak ditentukan semata oleh kebijakan PTPN X. Gerakan sosial yang dilakukan FPTV mampu untuk mengangkat posisi petani setara dengan perusahaan. Bahkan, dalam tatanan kultural, petani kini mampu dan berani mengaspirasikan ketidaksetujuannya secara langsung. Sebuah keadaan yang tentu sulit ditemukan di era-era lalu. Jika pun ada yang mengungkapkan ketidaksetujuannya (masa lalu), tidak pernah dilakukan secara langsung, hanya pembicaraan harian sesama petani. Wening Swasono mengisahkan,

...dulu, di awal inisiasi gerakan, meski telah berani melakukan aksi tuntutan, pola pikir petani masih belum berubah. Cerita menarik adalah ketika kita menghadap ke DPRD Komisi B. Apa yang terjadi? Petani yang diajak datang ternyata menggunakan baju batik yang (mungkin) paling bagus, dan melepas sandal ketika akan masuk ke gedung DPRD Klaten. Namun sekarang, berhadapan dengan DPRD atau pun pihak PTPN X bukanlah hal yang sakral lagi seperti dulu (Sasono, Wening 2008, wawancara, Juli).

Selain itu, PTPN X juga melakukan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Program tersebut dalam bentuk bantuan pinjaman dana untuk usaha masyarakat di Klaten. Awalnya, program CSR ini tidak banyak diketahui, bahkan dugaan Wening, program ini telah ada sejak lama tetapi hanya bisa diakses oleh pegawai PTPN X. Tetapi saat ini PTPN X telah berkenan membuka diri untuk melakukan program CSR untuk masyarakat setempat. Sampai sekarang, telah ada dua orang yang mendapat pinjaman usaha, yakni usaha toko kelontong dan peternakan. Hal ini juga merupakan bukti bahwa PTPN semakin membuka diri dengan masyarakat, yakni dalam hubungan yang lebih seimbang, bukan sebagai mereka “yang lebih tinggi”.

2. Mereduksi Interaksi Patronklien: Lingkup Lahan dan Gudang

Usaha yang dilakukan FPTV juga mampu mengubah pola interaksi antara *mandor* dengan buruh lahan. Dahulu *mandor* bisa memilih siapa saja yang akan dijadikan buruh sesuai dengan keinginannya. Hal itu jelas berbeda dengan sekarang. Dalam 11 materi tuntutan di awal gerakan FPTV, jelas tercantum adanya tuntutan untuk memberikan jaminan kesehatan dan kecelakaan serta mengutamakan buruh yang berasal dari desa setempat. Setelah tuntutan tersebut terpenuhi,²¹ kini *mandor* tidak bisa lagi berbuat seenaknya terhadap buruh. *Mandor* tidak bisa lagi membawa buruh dari desa lain yang mungkin memiliki hubungan kerabatan dengannya. Apalagi jika terjadi kecelakaan di lahan, *mandor* memiliki tanggung jawab moral untuk membantunya. Hal ini bisa dibaca sebagai upaya untuk memutus interaksi Patronklien antara *mandor* dan buruh, meski sebenarnya *mandor* masih sebagai penentu utama siapa yang akan menjadi buruh. Namun, ini sudah mampu mereduksi pola-pola hubungan diadik yang dikotomis dan hierarkis.

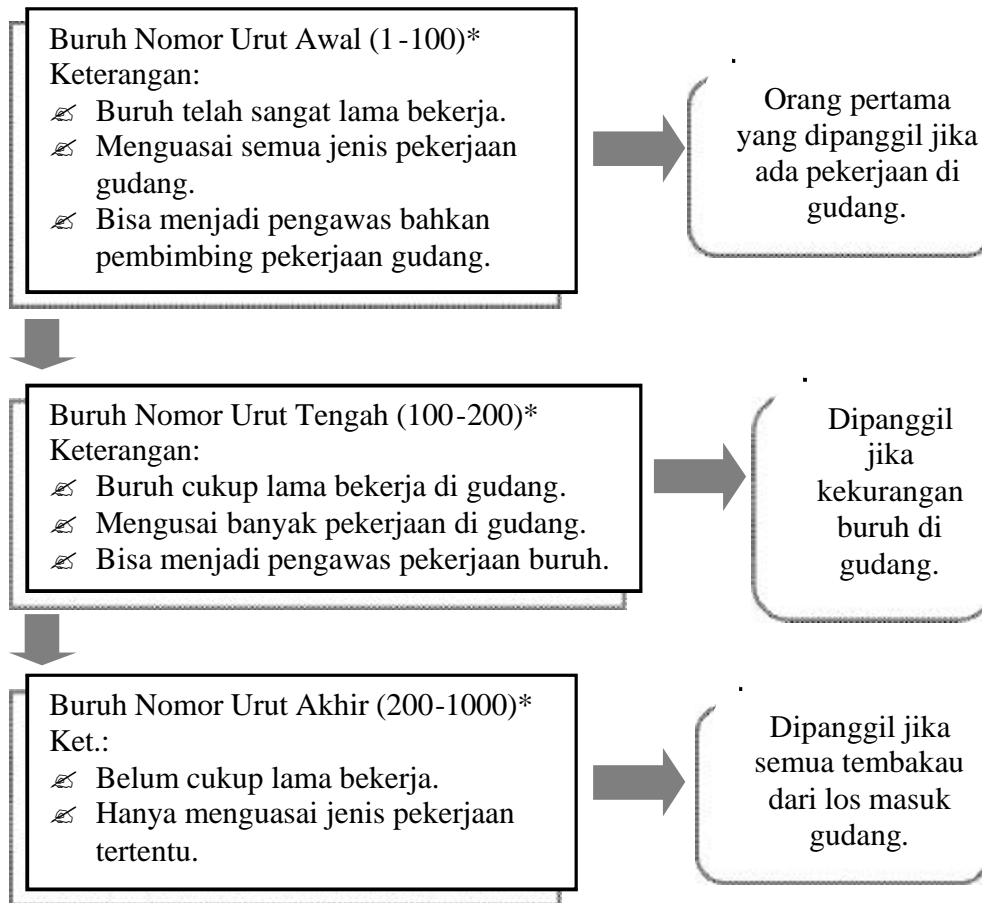
Terputusnya pola hubungan patronase tidak hanya karena FPTV eksis untuk memperkuat posisi petani, tetapi juga didukung beberapa inovasi yang dilakukan PTPN X. Hal ini ditunjukkan dalam hal rekrutmen buruh gudang. Buruh gudang tembakau bukanlah pekerjaan di mana setiap orang bisa melakukannya. Di antara pekerjaan buruh gudang misalnya adalah memisahkan tembakau ke dalam jenis-jenis kualitas.²² Pekerjaan tersebut tidak hanya membutuhkan pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan kepekaan yang terlatih.

Dalam dua tahun ini, menurut Subagio, Kepala Bagian Pengolahan PTPN X, pola rekrutmen buruh gudang sudah lebih tersistematisasi. Setiap buruh memiliki nomor induk masing-masing. Nomor induk yang urutannya awal jelas mereka buruh yang lebih terampil dan sudah bekerja cukup lama. Sehingga, jika digudang ada tembakau yang harus diolah, maka mereka yang memiliki nomor urut awal yang akan dipanggil terlebih dahulu. Saat tembakau dari semua los sudah masuk gudang, tentunya dibutuhkan lebih banyak buruh (mencapai jumlah ribuan), maka buruh yang memiliki nomor urut awal akan menjadi pengawas dan pembimbing bagi pekerjaan buruh-buruh yang baru (nomor urut belakangan). Untuk lebih jelas memahami pengaturan buruh gudang PTPN X, bisa diilustrasikan dari Bagan 3.

²¹ Dibuktikan dengan selalu tercantumkan dua materi itu hampir di semua kontrak kerja sama antara petani dengan FPTV.

²² Kualitas *grade* tembakau ada empat bagian utama, yakni NW (*nature wrapper*), LPW (*Light Painting Wrapper*), PW (*Painting Wrapper*), dan Filler (paling murah). Setiap pemilahan kualitas tersebut masih dibagi lagi dalam beberapa klasifikasi yang jumlahnya tidak sedikit. Informasi ini dijelaskan oleh Santo Rahayu, *Ziender* Wedi-Birit.

Bagan 3 Ilustrasi Pengaturan Buruh



Keterangan:

Tanda (*) hanya sebuah permisalan, karena jumlah pastinya masih mengikuti kebutuhan gudang.

Dengan adanya cara rekrutmen demikian, maka interaksi yang sifatnya patron semakin tereduksi. Pertama, dengan menggunakan sesama buruh sebagai pembimbing atau pengawas, interaksi antarburuh tidak lagi terkesan sebagai majikan dan pembantu. Apalagi, senioritas itu berdasarkan keahlian kerja, bukan usia atau kedekatan dengan pegawai, tentunya akan mengubah *mindset* buruh pada profesionalitas. Kedua, tidak ada lagi kepala desa yang menitipkan kerabatnya untuk menjadi buruh gudang, sebab penentuan masuk tidaknya ditentukan oleh nomor induk. Jika memang kekurangan buruh, PTPN X sendirilah yang akan mencari. Profesionalisasi pada rekrutmen buruh ini merupakan langkah nyata yang mampu mendorong hubungan yang sifatnya "induk semang-klien" tereduksi dengan sendirinya.

3. Memutus Interaksi Patron Klien: Kajian Teoritis

Setelah melihat uraian di atas, sekarang coba diuraikan secara teoritis apakah hubungan Patronklien itu sudah pudar. Dalam analisis James Scott, hubungan Patronklien memiliki beberapa ciri pokok yang membedakan dengan hubungan sosial lainnya (Putra, Hedy Shri Ahimsa 1988:3-5). *Pertama*, terdapat ketidaksamaan (*inequality*) dalam pertukaran. Scott mengatakan sebagai,

“... *there is an imbalances in exchange between the two partners which express and reflect the disparity in their relative wealth, power and status (... di sini terdapat ketidakseimbangan dalam pertukaran antara dua pasangan, yang mencerminkan perbedaan dalam kekayaan, kekuasaan, dan kedudukan)*”.

Kedua, adanya sifat tatap muka (*face-to-face character*). Sifat tatap muka ini menunjukkan adanya sifat pribadi di dalamnya. Artinya, hubungan yang dibangun melibatkan hubungan instrumental, di mana kedekatan pribadi ada di dalamnya. Ketiga, sifat yang luwes dan meluas (*diffuse flexibility*). Hedy Shri Ahimsa Putra menjelaskan bahwa dalam hubungan Patronklien tidak hanya pada persoalan pertukaran (untung-rugi), tetapi juga kedekatan sebagai kerabat, tetangga, teman sekolah, atau mungkin kedekatan orang tua.

Dengan menggunakan cara pandang demikian, ciri-ciri Patronklien bisa diuraikan satu per satu. Ciri pertama adalah ketidaksamaan dalam pertukaran, khususnya kekuasaan dan kedudukan. Jika melihat pada kondisi saat ini, ketidakseimbangan kedudukan sudah tidak mecolok dibandingkan kondisi sebelum ada FPTV. Dengan adanya FPTV, segala ketimpangan kedudukan selalu diperjuangkan agar selalu sama. Hal ini tercermin dalam materi-materi perundingan, termasuk poin harga yang selalu diperjuangkan agar terus meningkat (lihat, Tabel 5). Saat ini, secara kedudukan, antara petani (diwakili FPTV) dengan pihak PTPN X memiliki kedudukan seimbang dalam kerja sama kemitraan.

Kedua, Patronklien menunjukkan sifat *face-to-face character*, sebuah bentuk hubungan pribadi. Sifat ini juga bisa dikatakan semakin hilang dalam hubungan kemasyarakatan di Klaten. Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) menunjukkan bahwa hubungan sosial di Klaten, yakni antara petani dan PTPN X bukan semata bersifat pribadi, melainkan lebih sebagai respons kebutuhan sosial masyarakat Klaten. Artinya, pascaOrde Baru, PTPN X sebagai perusahaan besar dipaksa untuk memiliki respons terhadap kehidupan sosial di lingkungan sekitarnya.

Ciri ketiga terkait kedekatan kekerabatan, tetangga, atau hubungan sejenisnya. Ciri ini juga menunjukkan ada penerapan hubungan kerja berdasarkan *diffuse flexibility*. Buktinya, seorang *mandor* tidak bisa lagi membawa kerabatnya dari desa tertentu untuk menjadi buruh lahan di desa lain. Kepala desa pun tidak bisa dengan seenaknya menitipkan kerabat atau tetangganya sebagai buruh gudang. Ini merupakan contoh konkret semakin pudarnya ciri *diffuse flexibility*. Dari semua uraian di atas, jelaslah bahwa hubungan Patronklien antara petani tembakau *Vorstenlanden* dengan PTPN X telah terputus.

BAB VI

Penutup

Bab ini merupakan titik kulminasi dari seluruh rangkaian narasi dan analisis yang tersaji dalam laporan penelitian ini. Ibarat membangun sebuah rumah, bagian ini adalah pengecatan tembok yang merupakan pekerjaan akhir hingga bangunan tersebut bisa disebut rumah. Begitupun dengan makalah ini. Pembahasan ini merupakan pekerjaan terakhir hingga makalah ini bisa dikatakan sebagai hasil penelitian. Sebelumnya, telah selesai dikerjakan: aspek sosiologis masyarakat yang diteliti (Bab II), hubungan sosial ekonomi antara petani dan PTPN X (Bab III), awal kemunculan dan bentuk gerakan sosial FPTV (Bab IV), hingga analisis terkait gerakan sosial serta terputusnya hubungan Patronklien di perkebunan tembakau *Vorstenlanden* (Bab V). Bahasan-bahasan tersebut sekiranya dapat memberi gambaran arah penelitian ini.

A. Kesimpulan Teoritis

Berbicara tentang gerakan FPTV tentu tidak bisa lepas dari latar belakang sosial ekonomi masyarakat petani tembakau *Vorstenlanden*. Untuk itu, patut dicatat bahwa birokratisasi negara (khususnya era Orde Baru) telah menjelma menjadi alat penindas bagi petani, terutama memaksa penggunaan hak milik tanah, harga beli tembakau yang rendah, upah kerja di bawah angka minimal, hingga diskriminasi gender. Hingga pada momentum reformasi, yang memiliki implikasi pada krisis moneter, ketertindasan itu menjelma menjadi gerakan sosial petani, yang tentunya dimotori kelompok intelektual organis. Secara teoritis, faktor yang melatarbelakangi kemunculan FPTV ini sejalan dengan teoritisasi Susan Ekstein²³ yang mengatakan bahwa ketidakadilan dan penindasan yang tidak dapat ditolelir, serta lonjakan biaya hidup akibat krisis ekonomi, merupakan dua penyebab utama yang melahirkan suatu gerakan sosial. Begitu pun dengan kasus gerakan FPTV yang lahir karena faktor ketidakadilan melalui birokratisasi negara, dan mendapat momentum pada krisis ekonomi-politik nasional yang ditandai oleh runtuhnya struktur kekuasaan otoritarian Soeharto.

Sebagai sebuah gerakan sosial, FPTV jelas didorong oleh sebuah gagasan (*idea*) yang kokoh. Artinya, FPTV masih bisa bertahan hingga saat ini, jelas karena ada sebuah gagasan yang disepakati bersama. Gagasan tersebut tidak lain adalah selalu memperjuangkan kesejahteraan petani. Namun bagaimana gagasan itu diaktualisasikan pada wilayah praksis. Langkah mengajak duduk bersama untuk menemukan poin-poin

penting dalam kontrak kerja sama merupakan cara FPTV mengaplikasikan gagasannya. Karena, hanya pada materi tuntutan itulah perjuangan kesejahteraan (sebagai *idea* utama) dapat dicapai. Cara demikian sebenarnya menyambung pada reproduksi hegemoni, yang dengan sokongan intelektual organis FPTV, petani memiliki *bargaining position* yang kuat di hadapan (hegemoni) PTPN X, tidak seperti di era-era sebelumnya.

Menyambung pada reproduksi hegemoni yang dilakukan FPTV, gerakan petani ini ternyata memiliki dampak yang signifikan terhadap perubahan struktur hubungan Patronklien di lingkungan perkebunan tembakau *Vorstenlanden*. Jika dahulu, petani selalu diposisikan sebagai mereka “yang lebih rendah”, maka setelah ada FPTV sifat hubungan lebih seimbang. Inilah yang sebenarnya mendasari judul penelitian ini, bahwa gerakan sosial FPTV mampu memutus hubungan Patronklien antara PTPN X dengan petani tembakau *Vorstenlanden*. Selain itu, gerakan FPTV yang mendesak PTPN X untuk menerapkan profesionalisme, juga mampu mereduksi hubungan patronase di lingkungan gudang. Bahkan, dengan desakan FPTV pula, saat ini program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PTPN X bisa berjalan untuk masyarakat Klaten, yang merupakan wilayah kerja PTPN X Unit Tembakau.

B. Rekomendasi Kebijakan

Sebagaimana peringatan Karl Marx, ilmuan jangan hanya berhenti pada tataran mengetahui saja, tetapi juga harus mampu mengubahnya. Untuk itu, pada bagian ini ada beberapa rekomendasi (untuk perubahan) yang arahnya lebih ke substantif kebijakan, di antaranya:

1. Bagi FPTV

Persoalan yang dihadapi FPTV saat ini adalah belum adanya regenerasi dalam struktur organisasi. Hal itu dibuktikan dengan kepemimpinan Wening Swasono dan Slamet yang berjalan hampir satu dekade. Hal ini sebenarnya disadari oleh mereka, bahwa regenerasi kepemimpinan merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan lagi.

2. Bagi PTPN X

PTPN X diharapkan lebih transparan dalam hal harga jual ekspor dan biaya produksi. Jika di era reformasi ini, penggalakan transparansi ke semua sektor sedang digiatkan, mengapa PTPN X yang *notabane* perusahaan negara tidak turut menggalakkannya. Transparansi akan lebih mengarahkan pada hubungan yang lebih seimbang antara petani dan PTPN X. Dengan begitu, makna *partnership* benar-benar sebagai kemitraan yang setara. Hal itu bisa dicapai jika kedua pihak saling terbuka. Jika tidak demikian, sebenarnya PTPN X masih memiliki hegemoni yang kuat, terutama terkait penentuan harga.

Daftar Pustaka

- _____, Sartono dan Djoko Suryo. 1991. *Sejarah Perkebunan Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi*, Penerbit Aditya Media, Yogyakarta.
- _____. 1999. *Masyarakat Indonesia dalam Transisi*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- _____. *Aspek Sosial Ekonomi Pengusahaan Tembakau Cerutu Vorstenlanden*. 2005. Arsip yang dicetak PTPN X, 31 Januari, Klaten.
- _____. *Daftar Los Pengering Kebun Kebunarum/Gayamprit/Wedi Birit, Posisi Per: 7 Agustus 2008*". 2008. Arsip milik PTPN X Unit Tembakau Klaten, Klaten.
- _____. 2000. *Senjatanya Orang-Orang Kalah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Adenan, Djasmasri. 1999. *Berbagai Bentuk Rumusan Sistem Sewa dan Bagi Hasil Kerjasama antara Petani dengan Perusahaan Perkebunan*, Tidak diterbitkan. Makalah untuk seminar tembakau *Vorstenlanden* PSAP UGM, 11 Februari.
- Anonim. 2007. *Annual Report 2006 PTPN X*.
- Azhar, Ipong A. 1999. *Radikalisme Petani Masa Orde Baru: Kasus Sengketa Tanah Jenggawah*, Yayasan Untuk Indonesia, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Klaten. 2007. *Klaten dalam Angka Tahun 2006*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten, Klaten.
- Effendhie, Machmoed. 1993. *Industri Perkebunan dan Perubahan Masyarakat Desa*, Fakultas Sastra UGM, Yogyakarta.
- Fakih, Mansour. 2004. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Johnson, Doyle Paul. 1994. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Kartodirdjo, Sartono, dkk. 1989. *Pedesaan 1989: Masalah dan Prospek Komoditi Perkebunan*, Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan, Yogyakarta.
- Koentjaraningrat. 1990. *Sejarah Teori Antropologi*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Kuntowijoyo. 2002. *Radikalisasi Petani*, Bentang, Yogyakarta.
- Madenar, *Melengok ke Belakang, Menatap Masa Depan: Pengalaman Petani Tembakau Vorstenlanden dalam Kerjasama dengan Perusahaan Perkebunan Tembakau*. 1998. Tidak dipublikasikan. "Workshop Pemberdayaan Petani dan Buruh Tani Tembakau di Klaten dalam Mengantisipasi Peluang Perdagangan Tembakau Internasional: Perspektif *Fair Trade*". Klaten.
- Manalu, Dimpos, dkk. 2008. *Membangun Prakarsa Gerakan Rakyat: Kumpulan Tulisan Memperingati 25 Tahun KSPPM (1983-2008)*, KSPPM, Parapat.
- Mubyarto dkk. 1992. *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan: Kajian Sosial Ekonomi*, Penerbit Aditya Media, Yogyakarta.
- Narbuko, Cholid. 2003. *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Semarang.
- Padmo, Soegijanto dan Edhie Djatmiko. 1991. *Tembakau: Kajian Sosial Ekonomi*, Penerbit Aditya Media, Yogyakarta.
- Padmo, Sogijanto. "Pengusahaan Tembakau Cerutu dan Dampaknya Terhadap Masyarakat", dalam *Prisma*, No. 4 Tahun XX, April 1991, Jakarta.
- Putra, Heddy Shri Ahimsa. 1988. *Minawang: Hubungan Patronklien di Sulawesi Selatan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ramli, Andi Muawiyah. 2007. *Peta Pemikiran Karl Marx: Matrialisme Dialektis dan Matrialisme Historis*, LkiS, Yogyakarta.
- Salim, Agus. 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Scott, James C. 1993. *Perlawanan Kaum Tani*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Soeprapto, Y. Sarworo, Nasikun, dan Purwanto. "Hubungan Patronklien di Lingkungan Perkebunan Tembakau *Vorstenlanden* Klaten Jawa Tengah: Perspektif Sosiologis tentang Ketahanan Nasional", dalam *Sosiohumanika* No. 16A (11), Januari 2003, Jawa Barat.

- Subangun, Emmanuel dan Djatmiko Tanuwidjojo. 1993. *Industri Hasil Tembakau: Tantangan dan Peluang*, Satuan Tugas Industri Rokok, Jakarta.
- Sugandi, Yulia. 2002. *Rekonstruksi Sosiologi Humanis Menuju Praksis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiono, Muhadi. 2006. *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suhardi, dkk. 1998. *Pemberdayaan Kelompok Petani Tembakau dan Buruh Tani di Klaten dalam Mengantisipasi Peluang Perdagangan Tembakau Internasional Perspektif Fair Trade*, Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat UGM., Yogyakarta.
- Suhartono, *Perkebunan Tembakau di Klaten: Tinjauan Historis*, tanpa keterangan waktu dan publikasi.
- Suhartono. "Agroindustri dan Petani: Multi Pajak di *Vorstenlanden* 1850-1900", dalam *Prisma*, No. 4 Tahun XX, April 1991, Jakarta.
- Suhartono. 1991. *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Tarrow, Sidney. 1998. *Social Movements and Contentious Politics*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Wertheim, W. F. 1964. *East-West Parallels: Sociological Approach to Modern Asia*, W. van Hoeve Ltd, The Hague.
- Yin, Robert K. 2006. *Studi Kasus: Desain dan Metode*, Grafindo Persada, Bandung.